MAX WEBER
KONSEP-KONSEP DASAR DALAM SOSIOLOGI

MAX WEBER
KONSEP-KONSEP DASAR DALAM SOSIOLOGI

MAX WEBER
KONSEP-KONSEP DASAR DALAM SOSIOLOGI

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.

SERI PENGENALAN SOSIOLOGI 1

Penerbit
CV. RAJAWALI
Jakarta

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.
Max Weber, Konsep-konsep Dasar dalam Sosiologi
(Jakarta, CV. Rajawali, 1985)

Hak cipta 1985, pada Soerjono Soekanto

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan pertama, Juni 1985

85.0150 RAJ
Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.
Max Weber, Konsep-konsep Dasar dalam Sosiologi

Hak penerbit pada Penerbit CV. Rajawali, Jakarta

Tatamuka dikerjakan oleh Ismi Amrah
Kulitmuka dirancang M. Sudarmanto
Disetting oleh Bagian Setting CV. Rajawali
Dicetak di Percetakan Grafikatama Offset

Penerbit CV. Rajawali
Jl. Pelepah Hijau IV, TN 1 No. 15
Kelapa Gading Permai
Jakarta 14240.

KATA PENGANTAR

Max Weber adalah seorang tokoh peletak dasar-dasar sosiologi modern yang berasal dari Jerman. Buah fikirannya yang orisinal, hingga kini masih dipelajari dan diuji secara empiris. Penulisan buku ini merupakan suatu usaha untuk mengetengahkan beberapa konsep dasar dalam sosiologi, sebagaimana dirumuskan dan diuraikan secara garis besar. Maksudnya adalah untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar itu kepada mereka yang berminat untuk mempelajari teori sosiologi pada tahap awal agar ada kemampuan untuk menguasai landasan-landasan teoritis yang sangat penting bagi pengembangan ilmu.

Mula-mula diketengahkan konsep Weber mengenai perilaku sosial, yang kemudian dilanjutkan dengan konsepnya mengenai hubungan sosial. Dalam kerangka pembahasan kedua konsep tersebut muncul konsep mengenai wewenang, yang begitu penting sebagai landasan pengikat kehidupan berkelompok. Setelah itu uraian ditutup dengan menyajikan konsep-konsep mengenai kelompok-kelompok yang relatif resmi dan teratur.

Mudah-mudahan buku yang tipis ini akan dapat melengkapi bahan pustaka acuan yang telah ada. Kepada Drs. Zubaidi dan C.V. Rajawali diucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menerbitkan buku ini, demikian pula kepada Ny. Wardani Soerjono yang telah memeriksa kembali naskah ini.

Jakarta, Juni 1985
Soerjono Soekanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II KONSEP SOSIOLOGI DAN ARTI PERILAKU SOSIAL 17

A. Dasar-dasar Metodologis 17
B. Konsep Perilaku Sosial 43
C. Bentuk-bentuk Karakteristik Perilaku Sosial 46
D. Tipe-tipe Perilaku Sosial 49

BAB III HUBUNGAN SOSIAL 53

A. Konsep Hubungan Sosial 53
B. Konsep Perjuangan 57
C. Komunalisasi dan Agregasi Hubungan-hubungan Sosial 61
D. Hubungan Sosial Terbuka dan Tertutup 64
E. Tanggung Jawab dalam Hubungan Sosial 67

BAB IV KONSEP WEWENANG 71

A. Konsep Wewenang yang Sah 71
B. Tipe-tipe Wewenang yang Sah 74
C. Validitas Wewenang yang Sah 78
D. Tipe-tipe Wewenang pada Kelompok Korporatif 81
E. Hakikat Wewenang Administratif dan Regulatif dalam Kelompok-kelompok Korporatif 82
F. Konsep-konsep Kekuasaan dan Dominasi 83

BAB V KONSEP DAN TIPE KELOMPOK KORPORATIF 87

A. Konsep dan Tipe 87
B. Hakikat Organisasi 90
C. Tipe-tipe Kelompok Korporatif Politik dan Keagamaan 91

BAB VI PENUTUP 95

BAB I
PENDAHULUAN

Max Weber dilahirkan 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, yang dewasa ini masuk wilayah Jerman Timur. Max merupakan anak sulung suatu keluarga terpandang yang memberikan penilaian tinggi pada pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena di rumahnya selalu tersedia bahan bacaan yang baik, maka semenjak berusia empat belas tahun Max telah mampu membaca hasil-hasil karya Homer, Virgil maupun Livy dalam bentuk aslinya, secara lancar. Ketika Max menyelesaikan studinya pada Gymnasium, dia telah membaca keempat belas jilid karya Goethe edisi Weimar, menyajikan hasil karya Shakespeare dalam bahasa Inggeris, serta mengulas hasil-hasil karya Spinoza, Schopenhauer maupun Kant. Pendidikan lanjutan diperolehnya pada Fakultas Hukum Universitas Heidelberg, namun perhatiannya terhadap filsafat dan ekonomi menyebabkannya mengikuti kuliah-kuliah dalam bidang itu secara teratur.

Walaupun perhatiannya sangat besar untuk mempelajari sesuatu, Max bukan seorang kutu buku yang sinambung pada masa studinya. Max ternyata tidak mampu memilih apakah akan menjadi seorang ilmu-

wan ataukah seorang yang baik budi bahasanya. Mungkin karena mengatasi keinginannya untuk menjadi penyendiri, dia menggabungkan diri dengan suatu organisasi pemuda, sehingga terlibat dengan pola kehidupan riang-gembira, agak kasar, serta penuh dengan pandangan-pandangan nasionalistis yang agak dangkal. Sikapnya yang agak kasar menimbulkan amarah pada ibunya, yang ingin mengembalikan Max menjadi seorang pemuda yang berbudi bahasa baik. Hal ini perlu dicatat, oleh karena semenjak itu Max selalu dihinggapi dilema untuk menganuti kehidupan ilmuwan yang serba terpencil atau kehidupan yang melibatkan dirinya dalam pergaulan yang luas. Kalau dia terlalu jauh terlibat dalam kehidupan politik, maka peristiwa yang dialami dengan ibunya, mengakibatkan timbul keragu-raguan dalam dirinya.

Dalam tahun 1883, Max memasuki pendidikan militer, yang membuka kemungkinan untuk menjadi perwira cadangan bagi mereka yang berpendidikan sarjana. Walaupun dia tidak menyukai pendidikan militer itu, namun bagi Max tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan diri, oleh karena dia pernah mengalami pergaulan yang serupa semasa dia menggabungkan diri dengan organisasi pemuda. Setelah menyelesaikan pendidikan militer, dia tidak kembali ke Heidelberg, tetapi meneruskan studinya di Berlin. Di Berlin dia sangat terpengaruh oleh ajaran-ajaran Gneist dan Gierke; dari Gneist dia memperoleh pengetahuan mengenai masalah-masalah keparlemenan Inggeris, sedangkan pemahaman terhadap sejarah hukum Jerman diperolehnya dari Gierke. Dia juga mendapatkan ajaran-ajaran Treitschke mengenai nasionalisme yang dinilainya dengan fikiran yang kurang memuaskan dirinya. Setelah menetap sejenak di Goettingen, pada 1866 Max kembali ke Berlin; di sana dia menempuh

ujian ilmu hukum dan dengan terpaksa menerima tugas menempati suatu kedudukan pada pengadilan pidana Berlin. Oleh karena pekerjaan tersebut membosankan, Max meneruskan studinya di bawah bimbingan Profesor Mommsen serta menulis disertasinya. Disertasinya berisikan pendekatan-pendekatan interdisipliner yang melibatkan beberapa ilmu, seperti ilmu hukum, ekonomi, dan sejarah. Dalam bahasa Inggeris judul disertasinya adalah *A Contribution to the History of Medieval Business Organizations.*

Walaupun mendapat pujian dari pembimbingnya, namun Max belum dapat menentukan apakah suatu karier akademis akan dapat mengendalikan pusat perhatiannya. Menurut J.P. Mayer dalam bukunya *Max Weber and German Politics* (H.P. Secher 1962: 9)

> "The conflict whether he should turn to practical things or whether he should pursue the aim of achieving something outstanding in the field of scholarship and academic teaching — and only an outstanding achievement would satisfy him- is profound. This conflict is, as it were, of constitutional significance for Max Weber's whole being".

Bagi Weber kegiatan teoritis hanya mengandung arti dalam kerangka penerapannya, sehingga hal itu mengakibatkan pusat perhatiannya lebih banyak terarah pada metodologi daripada spekulasi-spekulasi metafisik.

Sementara itu Max meneruskan kegiatannya untuk memenuhi persyaratan menjadi dosen ilmu hukum pada Universitas Berlin. Kegiatan itu menghasilkan analisa terhadap sejarah agraris masyarakat Romawi yang dilihatnya dari sudut perkembangan

politik, ekonomi dan sosial, yang kemudian disajikan dalam sebuah buku yang terbit dalam tahun 1891.

Ketika dia sedang melakukan kegiatan untuk memenuhi kualifikasi sebagai dosen pada Universitas Berlin, Max menjadi anggota "Verein fur Sozialpolitik". Organisasi itu bertujuan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan, aturan perbankan dan praktek bisnis maupun penanggulangan masalah-masalah sosial lainnya. Anggota-anggota orgnisasi itu dikenal dengan nama "Katheder Sozialisten" yang sebenarnya merupakan versi Jerman Masyarakat "Fabian" Inggeris. Sebagai anggota organisasi itu Weber menemukan penyaluran keinginannya untuk menggabungkan penemuan teoritis dengan penerapannya, dan keterlibatannya dalam pelbagai kegiatan meningkatkan kepekaannya terhadap masalah-masalah sosial-politik pada masa itu.

Dalam tahun 1892 Weber menikah dengan Marianne Schnitger dan semenjak itu dia mulai memberikan kuliah-kuliah secara formal pada Universitas Berlin. Dua tahun kemudian Max menerima tawaran untuk menjadi gurubesar tetap pada Universitas Freiburg. Pidato pengukuhannya (dalam bahasa Inggeris berjudul *The National State and Germanic Policy* merupakan suatu proyeksi pemikirannya di bidang politik di kemudian hari. Masalah pokok yang dikemukakannya adalah pertanyaan apakah kalangan borjuis Jerman cukup matang untuk menerapkan kepemimpinan politik negara Jerman pada masa itu. Weber meragukan adanya kemampuan tersebut, namun dia berpendapat bahwa saatnya belum terlambat untuk menanggulangi kelemahan tersebut, yakni dengan pendidikan politik untuk seluruh bangsa. Pendidikan politik harus menjadi tujuan ilmu politik.

Tidak lama kemudian Weber diangkat menjadi gurubesar ekonomi pada Universitas Heidelberg, tempat dia menikmati kehidupan intelektualnya dengan penuh gairah. Namun, Weber mengalami kemerosotan mental yang sangat serius, sehingga semua kegiatannya terhenti. Selama hampir empat tahun dia mengalami keadaan demikian, sehingga tak ada satu pun yang dihasilkannya. Keadaannya mulai pulih dalam tahun 1903 dan semenjak itu dia menekuni masalah metode ilmu-ilmu sosial. Dia diangkat menjadi editor *Archiv fur Sozialwissenschaften* yang kemudian menjadi majalah ilmu-ilmu sosial yang sangat berpengaruh di Jerman hingga awal pemerintahan Hitler.

Pada tahun 1904 untuk pertama kalinya Weber mengunjungi Amerika Serikat guna mengikuti suatu kongres ilmu pengetahuan sedunia di kota St. Louis. Selama berada di Amerika Serikat, Max mulai memahami arti abad ke duapuluh dengan adanya massa serta kebutuhan adanya birokrasi mantap untuk menguasai massa tersebut. Dalam tahun yang sama Weber menerbitkan buku berjudul *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.* Dalam bukunya itu Weber menganalisa awal timbulnya kapitalisme dengan maksud agar diperoleh pemahaman mengenai pentingnya kapitalisme ekonomi maupun akibat-akibatnya pada tahap kontemporer. Weber menyatakan, di Amerika Serikat sama sekali tidak ada landasan keagamaan atau etis untuk mengejar kekayaan materiel, sehingga dia mengkhawatirkan mengejar kekayaan hanya dianggap sebagai suatu kegiatan mekanis belaka.

Semenjak tahun 1907 Max mengundurkan diri dari kegiatan memberikan kuliah pada Universitas Heidelberg dan melanjutkan peranannya sebagai

ilmuwan pribadi. Kemudian dia menulis sebuah buku mengenai ekonomi yang mencoba menganalisa evolusi peradaban Barat dalam kerangka perkembangan rasionalitas. Dia mencoba untuk menganalisa timbulnya peradaban industrial, dengan memberikan tekanan pada ciri-ciri yang membedakannya dengan karakteristik bentuk masyarakat sebelumnya. Menurut Weber, perkembangan ke arah peradaban industrial merupakan suatu kreasi perencanaan sosial melalui kapitalisme dalam iklim ekonomis, penerapan metode ilmiah di bidang intelektual serta penerapan birokrasi pada bidang politik.

Selama Perang Dunia Pertama berkecamuk, Weber menjadi administrator rumah sakit Angkatan Bersenjata Jerman. Pengalaman sebagai administrator tersebut memperkaya pengetahuannya mengenai birokrasi, sehingga dia mampu merumuskan beberapa prinsip sistem birokrasi. Dalam tahun 1918 dia menjadi konsultan pada Komisi Gencatan Senjata Jerman dan penasehat Komite Reformasi Konstitusional Jerman. nasehat Weber menghasilkan pasal 41 Konstitusi Weimar yang mengatur pemilihan Presiden. Pasal tersebut merupakan titik kulminasi pemikiran-pemikiran Weber mengenai Presiden sebagai titik sentral kepemimpinan kharismatis bagi pembangunan. Seorang pemimpin yang populer haruslah menjadi pusat setiap sistem politik. Meninggalnya Weber pada bulan Juni 1920 dalam usia 56 tahun justeru pada saat ajarannya mengenai pendidikan politik mulai berkembang.

Weber meninggalkan beberapa hasil studi yang belum diselesaikannya, misalnya "Wirtschaft und Gesselschaft" (Ekonomi dan Masyarakat). Walaupun hasil-hasil karyanya tersebut sangat luas ruang lingkupnya dan terjabarkan, Weber telah berusaha un-

tuk menyusun batasan-batasan yang dapat mengintegrasikan hasil-hasil studinya itu, sehingga dapat berfungsi sebagai pengantar bagi para pemula. Oleh karena kebanyakan batasan dan prinsip-prinsip diperoleh dari penelitian empiris, maka hal itu secara faktual telah diuji, dan dapat dianggap sebagai formulasi-formulasi awal bagi ilmu pengetahuan umum tentang perilaku sosial. Formulasi semacam itu, umpamanya, pernyataannya mengenai sosiologi sebagaimana tersajikan dalam majalah *Logos*, jilid IV (tahun 1913); pernyataannya itu kemudian menjadi dasar bagi isi halaman-halaman selanjutnya dari hasil karyanya. Versi selanjutnya dari pernyataan tersebut ditulisnya sesaat sebelum meninggal dunia dan diterbitkan setelah Max meninggal sebagai bab pertama dari *Wirtschaft und Gesellschaft* (dalam "Grundriss der Sozialekonomik", bagian III, Tubingen 1925).

Prinsip-prinsip metodologis tersebut dimulai dengan definisi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan mengadakan pemahaman interpretatif terhadap perilaku sosial guna mendapatkan penjelasan mengenai sebab-sebabnya, perkembangannya maupun pengaruhnya. Selanjutnya dijelaskan mengenai apa yang diartikan dengan pengartian-pengartian seperti, umpamanya, perilaku sosial, pemahaman, penjelasan kausal, dan arti-arti maupun sarana tipologis mana yang harus dipergunakan apabila mengadakan analisa. Hal-hal tersebut kemudian disajikan dalam karya-karya ilmiah seperti:

A. *Systematic Sociology in Germany* oleh Theodore Able (1929)
B. *Max Weber, An Intellectual Portrait* oleh Rienhard Bendix (1960)
C. *From Max Weber: Essays in Sociology* yang disunting oleh H.Gerth dan C.W. Mills (1946)

D. *Max Weber : The Theory of Social and Economic Organization* yang disunting oleh A.M. Henderson dan T. Parsons (1947).

Menurut Weber, perilaku manusia yang merupakan perilaku sosial harus mempunyai tujuan tertentu, yang terwujud dengan jelas. Artinya, perilaku itu harus mempunyai arti bagi fihak-fihak yang terlibat, yang kemudian berorientasi terhadap perilaku yang sama fihak lain. Perilaku yang bersifat introspektif seperti meditasi, atau perilaku yang berorientasi terhadap obyek atau situasi materiel bukanlah merupakan perilaku sosial. Untuk menganalisa perilaku sosial, Weber menciptakan tipe-tipe perilaku ideal sebagai pola, agar dapat membandingkannya dengan perilaku aktual.

Max Weber telah memperkenalkan pengartian tipe ideal yang dimaksudkannya sebagai ekspresi semua formulasi dan batasan konseptual dalam sosiologi. Pengartian tipe ideal dirumuskan dengan cara memberikan tekanan sefihak serta intensifikasi terhadap satu atau beberapa aspek suatu peristiwa yang mencerminkan struktur mental yang seragam. Weber menekankan bahwa tipe ideal tersebut harus merupakan suatu kemungkinan yang kuat, yakni harus paling sedikit mendekati kebenaran empiris. Dengan demikian konstruksi tipe ideal dapat dianggap sebagai suatu hipotesa kerja, yang sebelum diuji kebenarannya hanya mempunyai nilai analitis yang relatif kecil. Tipe ideal juga bersifat deskriptif murni dan tidak boleh disalahgunakan untuk menjelaskan data yang diungkapkannya. Dengan demikian tipe ideal juga tidak dapat dipergunakan sebagai indikator mengenai tindakan-tindakan apa yang harus dilaksanakan.

Tipe ideal merupakan suatu sarana untuk menyusun klasifikasi, yang berguna untuk mengatur kategori-kategori secara sistematis dari semua hasil pengamatan yang pernah dilakukan. Dengan demikian dimungkinkan untuk menyusun tipe-tipe ideal birokrasi, feodalisme, demokrasi parlementer, kapitalisme dan kemudian membuat klasifikasi data hasil pengamatan yang paling dekat dengan tipe ideal tersebut.

Menurut Weber bentuk perilaku sosial yang paling penting adalah perilaku sosial timbal-balik atau resiprokal. Gejala itu kemudian tercermin dalam pengartian hubungan sosial, yang menurut Weber menjadi tema sentral sosiologi. Suatu hubungan sosial ada apabila para individu secara mutual mendasarkan perilakunya pada perilaku yang diharapkan oleh fihak-fihak lain. Beberapa tipe hubungan sosial yang penting adalah, perjuangan, komunalisasi, agregasi dan kelompok korporasi.

Perjuangan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menyangkut perilaku individual sedemikian rupa sehingga salah-satu fihak memaksakan kehendaknya terhadap perlawanan fihak lain.

Komunalisasi merupakan hubungan sosial yang didasarkan pada perasaan subyektif, baik yang bersifat emosional atau tradisional atau kedua-duanya.

Agregasi merupakan hubungan sosial yang didasarkan pada keserasian motivasi rasional atau keseimbangan berbagai kepentingan.

Suatu kelompok korporasi merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang berkaitan dengan wewenang yang dilandaskan pada kegiatan seorang pemimpin dan suatu staf administrasi.

Ketiga tipe hubungan sosial tersebut di atas mungkin terbuka atau tertutup, tergantung pada dasar peran sertanya, yaitu apakah kesukarelaan ataukah paksaan.

Suatu pengartian yang agak sulit difahami adalah pengartian "pemahaman" atau "verstehen". Pengartian tersebut agak sulit dimengerti, oleh karena Weber memberikan pengartian yang lebih luas daripada pengartian sehari-hari. Menurut Max, suatu perilaku mungkin mempunyai arti tertentu, terlepas dari apakah seseorang atau beberapa orang terlibat dengannya serta memberikan arti tertentu pada perilaku tersebut. Seorang pengamat, perilaku itu juga belum tentu memahami artinya. Hal yang paling penting dari perilaku yang berarti adalah bahwa perilaku tersebut mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Sudah tentu perilaku tertentu mempunyai tujuan yang lebih jelas bila dibandingkan dengan perilaku lainnya, sedangkan sarana untuk mencapai tujuannya juga lebih jelas. Dengan demikian, suatu gerak refleks tidak berarti, oleh karena tidak mempunyai tujuan dan sarananya juga tidak difikirkan sebelumnya. Weber mengingatkan, tidak terdapat pemisahan yang kaku antara perilaku yang berarti dengan perilaku yang tidak bertujuan.

Bagi Weber pentingnya "pemahaman" dalam arti teknis murni adalah bahwa hal itu memberikan petunjuk pada pengamatan dan penafsiran teoritis terhadap keadaan kejiwaan subyektif manusia yang sedang dipelajari perilakunya. Dengan lain kata, "pemahaman" merupakan sarana penelitian sosiologis yang bertujuan untuk memberikan pengartian yang lebih mendalam, mengenai hubungan antara keadaan tertentu dengan proses perilaku yang terjadi. Dengan mempergunakan pengartian "pemahaman" tersebut

peneliti akan dapat mengetahui mengapa suatu aksi terjadi dan mengapa suatu pola perilaku tertentu mengikuti secara sinambung. Dengan cara demikian penelitian terhadap motivasi diperkenalkan sebagai sesuatu yang mendasari setiap penafsiran sosiologis. Pemahaman secara fungsional belaka mungkin cukup bagi ilmu pengetahuan alam, akan tetapi tidak demikian halnya dengan ilmu-ilmu sosial, yang harus meneliti sebab-sebab dan proses selanjutnya dari suatu perilaku sosial tertentu.

Kalau, misalnya, dapat ditentukan bahwa kapasitas perilaku rasional berkaitan dengan indeks sefalik tertentu dan apabila hubungan tersebut bersifat pasti dapat pula ditentukan adanya keinginan besar untuk berkuasa dan mempunyai prestise, maka hal itu hanyalah merupakan informasi bagi penelitian sosiologis dan bukan merupakan obyeknya. Analisa sosiologis dimulai dengan penjelasan kausal jenis perilaku sosial yang mengarah pada proses mendapatkan kekuasaan dan prestise dengan memperlihatkan hubungan itu, mengapa terjadi keberhasilan atau kegagalan, dan akibat-akibat usaha mendapatkan kekuasaan mempunyai arti bagi pribadi-pribadi atau fihak-fihak lainnya. Dengan demikian diperlukan pengetahuan mengenai seluruh keadaan sosial; pengetahuan mengenai keadaan atau peristiwa terasing tidak begitu penting, walaupun tampaknya seragam.

Weber berpendapat, walaupun proses pemahaman bersifat subyektif, namun seseorang yang terlibat di dalamnya dapat memberikan derajat obyektivitas tertentu yang diperlukan. Oleh karena seseorang tidak mungkin melepaskan diri secara mutlak dari orang lain yang memberikan penafsiran terhadap perilakunya, maka penafsirannya pun bersifat hipotetis dan tidak mutlak sebagaimana halnya dengan

penafsiran kausal dalam ilmu pengetahuan alam. Menghadapi kesulitan tersebut, Weber memberikan jalan keluarnya. Weber mengadakan pembedaan antara penafsiran yang hanya sesuai pada taraf artinya, dengan penafsiran yang secara kausal juga sesuai. Suatu penafsiran kausal yang sesuai diperoleh apabila kemungkinan terulangnya suatu gejala dalam kondisi yang sama dapat ditetapkan secara empiris. Oleh karena itu, kalau sosiologi ingin mencapai penjelasan ilmiah yang serasi, ilmu tersebut harus mempergunakan kedua kriteria itu, yakni kesesuaian pada taraf arti dan kesesuaian kausal. Kalau suatu perilaku tertentu tidak mempunyai arti, walaupun terdapat derajat keseragaman yang tinggi atau kemungkinan statistik yang cermat, hal itu tetap akan merupakan kemungkinan yang tidak difahami baik mengenai proses subyektif yang tampak maupun yang tidak.

Weber menyatakan, ada dua cara untuk mendapatkan "pemahaman" dan dua jenis "pemahaman" yang harus diperhitungkan. Suatu tipe perilaku dapat difahami artinya secara intelektual, apabila perilaku tadi rasional. Rasionalitas tersebut tergantung pada pola perilaku yang terwujud dengan cara yang dianggap logis; artinya, perilaku tadi sesuai dengan urutan perilaku yang dapat diduga. Suatu pemahaman juga dapat diperoleh dengan mempergunakan perasaan — bila perilaku itu bersifat irasional. Hal itu diperoleh dengan jalan memproyeksikan diri sendiri ke dalam situasi irasional.

Dengan mempergunakan kedua pendekatan tersebut, akan dapat ditemukan dua jenis pemahaman. Dengan cara mengamati suatu aksi biasa akan diperoleh pemahaman aktual. Hal ini mungkin merupakan bentuk pemahaman yang paling lazim. Di samping itu dapat pula diungkapkan motif-motif yang menjadi

dasar perilaku yang diamati; hal ini disebut sebagai pemahaman eksplanatoris oleh Weber. Untuk menetapkan hubungan yang berarti antara suatu aksi dengan motifnya, pengamat harus mampu memproyeksikan dirinya secara intelektual dan emosional dalam situasi yang sama, dengan pengetahuan bahwa dalam keadaan yang sama dia akan berperilaku serupa. Untuk memahami arti suatu bentuk perilaku secara aktual adalah dengan cara menerapkan cara berfikir deduktif. Akan tetapi untuk menjelaskan motif yang ada diperlukan suatu metodologi tertentu. Hal itu disebabkan karena pribadi yang berperilaku tertentu tidak selalu sadar terhadap motivasi yang dipunyai nya.

Batasan Weber mengenai negara terutama didasarkan pada wewenang, birokrasi, yurisdiksi atas wilayah tertentu dan monopoli penggunaan kekuatan secara sah. Secara cerdik Weber menghindarkan diri dari batasan negara modern dengan tertib hukumnya yang berpusat pada tujuan komuniti politik atau penilaian tertentu yang memancarkan kepercayaan terhadap dasar yang sah. Dia menyatakan, suatu komuniti politik telah mencapai tujuan-tujuan tertentu tanpa memudarkan ciri-ciri negara modern.

Weber beranggapan kekuasaan merupakan kesempatan bagi seseorang atau suatu fihak untuk memaksakan kehendaknya terhadap fihak lain walaupun hal itu bertentangan dengan kehendaknya. Namun Weber sendiri tidak menyukai perumusan tersebut karena dia cenderung mempergunakan pengartian dominasi yang sebenarnya merupakan kekuasaan politik. Dominasi diperoleh dengan cara mempengaruhi fihak-fihak lain melalui artikulasi eksplisit kehendak pemegang dominasi dan dengan memaksa agar perintahnya ditaati. Walaupun demikian, hubungan antara

penguasa dengan pengikut tergantung pada kepercayaan kedua belah fihak terhadap sahnya wewenang yang melaksanakan dominasi tersebut. Secara konsekuen Weber menganggap penting untuk mengakui tiga prinsip yang memberikan landasan sah pelaksanaan kekuasaan untuk memberikan perintah-perintah.

Weber membedakan antara wewenang kharismatis yang didasarkan pada magnetisme pribadi pemimpin dan timbul sebagai tanggapan terhadap suatu krisis, dengan dua tipe wewenang yang sifatnya lebih stabil. Kedua tipe tersebut adalah wewenang tradisional yang didasarkan pada kepemimpinan atas dasar kewarisan dan tradisi, serta wewenang legal yang didasarkan pada aturan-aturan formal dan patokan-patokan keadilan obyektif. Weber mengingatkan, tipe-tipe wewenang tersebut merupakan tipe-tipe ideal. Dia juga menyatakan, wewenang kharismatis menjadi wewenang tradisional atau legal bila berproses secara berkesinambungan. Namun apabila timbul krisis dalam masyarakat yang bersangkutan, wewenang kharismatis akan timbul lagi. Menurut Weber, pada masyarakat-masyarakat Barat umumnya, timbul kecenderungan wewenang tradisional menjadi wewenang legal dengan sistem birokrasi administratifnya yang semakin berkembang.

Demikianlah beberapa konsep pokok dalam sosiologi yang dikembangkan oleh Max Weber yang akan dijelaskan secara lebih terperinci dalam bab-bab selanjutnya. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa ada usaha-usaha untuk memisahkan konsep-konsep tersebut dari ajaran-ajaran umumnya. Penegasan beberapa konsep dasar sosiologi beserta penjelasannya secara singkat hanyalah merupakan suatu usaha untuk mempermudah pemahaman terhadap

karya-karya besar Weber di bidang sosiologi yang begitu luas dan mendalam.

BAHAN PUSTAKA ACUAN

Freund, Julien. *The Sociology of Max Weber.* (transl. Mary Ilford). New York: Vintage Books, 1969.

Secher, H.P. *Basic Concepts in Sociology by Max Weber.* New York : Citadel Press, 1962.

BAB II
KONSEP SOSIOLOGI DAN ARTI PERILAKU SOSIAL

A. DASAR–DASAR METODOLOGIS.

Pelbagai penafsiran dapat dipergunakan terhadap istilah sosiologi. Dalam kerangka ini sosiologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan memahami perilaku sosial secara interpretatif supaya diperoleh kejelasan mengenai sebab-sebabnya, prosesnya, serta efeknya. Suatu gejala akan disebut perilaku hanya sepanjang seseorang atau beberapa orang terlibat dalam aksi subyektif yang berarti bagi mereka. Perilaku itu mungkin bersifat mental atau eksternal; perilaku itu mungkin merupakan aktivitas atau keadaan pasif. Istilah perilaku sosial akan dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan bertujuan sebagaimana ditafsirkan oleh fihak-fihak yang terlibat dalam suatu hubungan.

Istilah "arti" akan dipergunakan dalam dua pengartian yang berbeda. Pertama-tama terdapat perilaku aktual oleh seseorang dalam situasi historis atau suatu kemiripan yang didasarkan pada kuantitas beberapa kasus yang melibatkan sejumlah pelaku. Kedua, terdapat tipe ideal yang bersifat konseptual arti subyektif yang dikaitkan pada pelaku hipotetis

dalam suatu tipe perilaku tertentu. Kedua pengartian tersebut tak dapat dipergunakan untuk memberikan pengartian yang benar bagi "arti". Di sinilah letak perbedaan antara ilmu-ilmu perilaku, seperti sosiologi dan sejarah, dengan disiplin-disiplin ortodoks seperti ilmu hukum, logika, etika, atau estetika, yang tujuannya menentukan hal yang benar dan sah obyek analisanya.

Garis pemisah antara hal yang berarti dengan perilaku yang semata-mata responsif bersifat tidak pasti. Suatu bagian penting perilaku sosiologis yang merupakan perilaku tradisional murni, bergerak antara keduanya. Hal yang berarti, perilaku yang dapat difahami secara subyektif tidak terwujud dalam pelbagai proses psikologis, atau kalaupun terwujud, maka hal itu hanya mungkin diamati oleh seorang ahli. Pengalaman-pengalaman dalam bidang mistik yang tidak mungkin dikomunikasikan melalui kata-kata, tidak akan mungkin dimengerti oleh orang-orang yang tidak mengalaminya. Di lain fihak, kemampuan untuk melakukan perbuatan yang sama bukan merupakan prakondisi terhadap pemahaman; kiranya tidak perlu menjadi seorang raja untuk memahami raja. Kemampuan menempatkan diri pada dirinya pelaku merupakan hal penting bagi kejernihan pemahaman, namun bukan merupakan prakondisi mutlak bagi penafsiran yang mengandung arti. Bagian-bagian yang mungkin difahami dan tidak difahami dari suatu proses kadang-kadang bercampur-aduk.

Setiap penafsiran sebagaimana umumnya dilakukan dalam ilmu pengetahuan, bertujuan memberikan bukti yang jelas dan yang dapat diuji. Bukti pemahaman tersebut mungkin bersifat rasional atau emosional. Bukti rasional dapat didukung dalam situasi perilaku

oleh penguasaan intelektual terhadap semuanya dalam ruang lingkup arti. Bukti yang bersifat emosional akan didukung oleh peran serta yang bersifat emosional pula. Kecerdasan langsung yang jelas merupakan taraf tertinggi pemahaman rasional, terutama dalam proposisi-proposisi yang terkait secara matematis dan logis. Apabila seseorang mempergunakan proposisi 2 + 2 = 4, maka hal itu dengan mudah difahami; demikian pula halnya apabila suatu rangkaian penalaran dilaksanakan secara logis sesuai dengan cara-cara berfikir yang sudah lazim dan diterima orang. Dengan cara yang sama aksi seseorang yang berusaha mencapai suatu tujuan dengan memilih sarana yang sesuai dapat dimengerti, apabila fakta situasi yang menjadi dasar pilihannya tidak asing lagi. Setiap penafsiran aksi yang bertujuan yang bersifat rasional mempunyai taraf bukti yang tertinggi. Walaupun tanpa kecermatan yang sama, namun adalah mungkin untuk memahami kesalahan-kesalahan dengan mempergunakan analisa diri. Di lain fihak, banyak tujuan atau nilai yang dianut manusia yang tidak dapat difahami, walaupun secara intelektual ada kemungkinan untuk menguasainya. Semakin banyak perbedaannya dengan nilai yang lazim dianut, semakin sulit untuk memahaminya melalui partisipasi. Apabila diperhitungkan keadaan kasus tertentu, maka sebenarnya cukup untuk memahami nilai-nilai tersebut secara intelektual; namun apabila ada kegagalan untuk memahaminya, maka nilai-nilai tersebut hendaknya diterima sebagai data yang ada. Apabila dimungkinkan, maka perilaku yang dimotivikasikan oleh nilai tersebut, dapat difahami atas dasar kemungkinan-kemungkinan yang timbul yang ada bagi penafsiran emosional atau intelektual pada pelbagai tahap perkembangan.

Apabila kepekaan semakin meningkat, semakin meningkat pula kemampuan untuk memahami hawa nafsu manusia, maupun perilaku irasional yang timbul. Walaupun derajat intensitas tempat emosi ditemukan jauh lebih tinggi dari potensi untuk memahami, masih ada kemampuan untuk menafsirkan pengaruhnya terhadap tujuan perilaku maupun pilihan yang dilaksanakan untuk memilih sarana untuk melaksanakannya. Bagi kepentingan analisa ilmiah sistematis lebih baik menyatakan semua unsur irasional-emosional perilaku sebagai suatu penyimpangan dari perilaku murni yang berorientasi pada tujuan.

Suatu konstruksi perilaku yang secara murni dan rasional berorientasi pada tujuan mungkin berfungsi sebagai tipe ideal dalam sosiologi, oleh karena kejelasan pemahamannya dan kepastiannya secara rasional. Dengan demikian timbul pula dukungan pada pemahaman mengenai pengaruh faktor irasional terhadap perilaku yang berorientasi pada tujuan, sehingga faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasikan sebagai penyimpangan terhadap perilaku orisinal hipotetis.

Metode pada sosiologi dapat dianggap rasionalistis, oleh karena efisiensi metodologis yang dapat dianggap sebagai sarana metodologis. Namun hal itu tak dapat dianggap sebagai penonjolan rasionalisme dalam kehidupan atau eksistensi manusia. Di sini bukanlah tempatnya untuk menentukan sampai sejauh manakah realitas rasionalisme menentukan perilaku. Namun kadang-kadang mungkin terjadi penafsiran rasional dilakukan secara keliru, halmana tentunya sangat berbahaya.

Di samping itu perlu dicatat, pada ilmu-ilmu peri-

laku manusia terdapat proses dan gejala yang tidak mempunyai arti subyektif. Proses dan gejala tersebut merupakan dorongan atau efek, yang mungkin mendukung perilaku manusia atau menjadi suatu penghalang. Perilaku tanpa arti itu tidak boleh disamakan dengan perilaku bukan manusia. Setiap artefak (misalnya sebuah mesin) hanya berarti sampai batas bahwa produksi dan penggunaannya mempengaruhi perilaku manusia, arti mana mempunyai pelbagai variasi dalam tujuan-tujuannya. Tanpa adanya acuan pada obyeknya, hal itu sama sekali tidak mempunyai arti.

Hal yang memberikan arti pada suatu obyek adalah hubungannya dengan perilaku manusia serta peranannya terhadap sarana atau tujuannya. Pada hubungan itulah manusia mungkin mempunyai kesadaran tertentu atau terhadap hubungan itulah perilaku manusia berorientasi. Hanya dalam pengartian kategori-kategori itulah suatu pemahaman terhadap obyek-obyek timbul.

Di lain fihak, semua proses atau kondisi tidak mempunyai arti apabila tidak dapat dikaitkan dengan suatu tujuan yang berarti; hal ini terlepas dari persoalan apakah hal itu bersifat manusiawi atau tidak. Dengan lain perkataan, hal itu tidak mempunyai arti apabila tidak dapat dihubungkan dengan perilaku dalam peranannya sebagai sarana atau tujuan, namun hanya bergerak sebagai dorongan yang mungkin mendukung atau menghalangi perilaku itu.

Gejala psikis atau psiko-fisikal seperti rasa lelah, disiplin, dan ingatan, harus dianggap sebagai kategori fakta lain yang tidak mempunyai arti; demikian pula halnya dengan reaksi yang berbeda-beda dari pribadi-pribadi tergantung pada keadaan alamiah, waktu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada

tahap analisa terakhir, prinsip yang harus dianut adalah sama dengan gejala yang tidak berarti; hal itu merupakan sumber data, baik bagi pengamat maupun pelaku yang terlibat.

Ada kemungkinan bahwa dalam penelitian-penelitian di masa mendatang akan dapat diungkapkan arti perilaku yang semula dianggap tidak mempunyai arti, walaupun kemungkinannya kecil sekali. Misalnya, perbedaan ciri-ciri biologis yang diperoleh karena kewarisan (yakni yang bersifat rasial) haruslah diterima sosiologi sebagaimana halnya dengan fakta fisiologis diperlukannya gizi atau efek keadaan mental terhadap perilaku manusia. Data tersebut hanya dapat diterima, sepanjang bukti statistik dapat mendukung pengaruhnya terhadap perilaku yang sosiologis penting. Pengakuan terhadap pentingnya kausalitas tidak mengubah tugas sosiologi, yang menafsirkan perilaku manusia yang mempunyai arti. Hasilnya hanyalah untuk memperkenalkan, pada titik-titik tertentu, data tanpa arti sama yang sudah ada pada perangkat motivasi-motivasi yang mempunyai arti. Data tersebut adalah, misalnya, hubungan-hubungan khas antara frekuensi perilaku berorientasi tujuan yang tertentu, atau ruang lingkup rasionalitas dan indeks sefalik atau warna kulit atau setiap ciri fisiologis yang diwariskan.

Jenis "pemahaman" ada dua; pertama pemahaman empiris langsung dari arti suatu aksi (termasuk pengucapan sesuatu secara verbal). Dalam pengartian inilah timbul pemahaman mengenai arti proposisi bahwa 2 x 2 = 4, apabila seseorang mendengar atau membacanya. Dalam hal ini manusia mengalami pemahaman suatu gagasan secara langsung dan rasional. Dengan cara yang sama manusia memahami keadaan bahaya dari teriakan, ekspresi wajah, atau

gerak-gerak irasional. Hal ini merupakan pemahaman empiris langsung reaksi emosional irasional dan hal itu tergolong dalam kategori yang sama dengan pengamatan terhadap gerak seorang pemotong kayu atau dari seseorang yang menutup pintu atau seseorang yang membidik. Hal ini merupakan pengamatan perilaku secara rasional empiris.

Yang kedua adalah pemahaman eksplanatoris. Setiap orang mampu untuk memahami motif seseorang yang menyebutkan 2 x 2 = 4 (baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis) pada waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu pula. Pemahaman demikian dapat diperoleh apabila orang yang diamati terlibat dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi tugasnya. Hal ini merupakan pemahaman motivasi yang mempunyai dasar rasional, yakni perbuatan tersebut dilihat sebagai bagian dari suatu situasi yang mempunyai arti. Sifat motivasional ditambahkan pada pemahaman observasional apabila diketahui bahwa melakukan pembidikan dilakukan dalam kegiatan rekreatif atau bahwa pemotongan kayu dilakukan untuk menambah penghasilan. Memang ada kemungkinan-kemungkinan lain, misalnya, bahwa orang yang membidik dengan senapan melakukan itu untuk menyalurkan perasaan, menembak orang lain, dan lain sebagainya, dalam halmana perilaku mempunyai sifat irasional.

Pada situasi-situasi tersebut di atas perilaku yang dipermasalahkan dapat dianggap sebagai bagian dari urutan perasaan yang dapat difahami. Pemahaman demikian dapat diterima sebagai penjelasan sesungguhnya dari proses perilaku aktual. Bagi suatu ilmu yang menelaah arti sebenarnya dari perilaku, penjelasannya memerlukan: genggaman kukuh terhadap konteks arti dalam mana proses aksi aktual berlangsung.

Dalam semua kasus demikian, proses-proses emosional subyektif dalam konteks artinya yang penting, dapat dianggap sebagai aksi yang bertujuan. Dengan demikian terjadi suatu perluasan terhadap kebiasaan yang hanya menganggap perilaku yang berorientasi pada tujuan sebagai perilaku yang bercirikan tujuan.

Dengan demikian, maka pemahaman berarti pemahaman interpretatif dari:

1. kasus-kasus individual kongkrit, misalnya, dalam analisa historis.
2. kasus-kasus biasa, sebagaimana halnya dalam analisa sosiologis terhadap massa, yang mengandung kemungkinan-kemungkinan yang mendekati kebenaran.
3. suatu tipe murni konsep yang biasanya diformulasikan secara ilmiah, misalnya konsep dan aksioma teori ekonomi murni. Konsep tersebut memperlihatkan tipe perilaku manusia yang terjadi atas dasar rasional yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional dan hanya tertuju pada suatu tujuan tunggal. Hal itu jarang terjadi pada perilaku aktual, sehingga dapat dianggap sebagai tipe ideal.

Setiap penafsiran bertujuan untuk mendapatkan pembuktian semaksimal mungkin. Namun, suatu penafsiran yang dibuktikan semaksimal mungkin belum tentu merupakan hal yang sah secara kausal. Hal itu tetap hanya dapat diterima sebagai suatu hipotesa. Oleh karena itu apa yang tampak sebagai motivasi yang disadari bagi seseorang yang terlibat mungkin hanya berfungsi untuk menyembunyikan motif-motif yang lebih mendalam yang menjadi dasar perilakunya yang mengakibatkan bahwa kegiatan meng-

adakan analisa diri menjadi tidak sah. Dalam kasus demikian menjadi tugas sosiologi untuk meneliti motivasi demikian secara lebih mendalam dan menafsirkannya dengan cermat, walaupun motivasi tersebut bukan merupakan bagian penuh perilaku individu yang bersangkutan. Dengan demikian, hal itu menjadi suatu kasus perbatasan dari penafsiran yang mengandung arti.

Bentuk-bentuk perilaku yang ditelaah oleh pengamat yang mungkin mempunyai ciri-ciri sama ternyata didasarkan pada pelbagai macam motif dalam diri seorang pelaku. Situasi demikian, yang tampaknya mempunyai ciri-ciri tertentu, memerlukan penafsiran yang berbeda pula, walaupun hal itu akan mengakibatkan terjadinya pertentangan dalam analisa. Selanjutnya dapat dikatakan, bahwa pribadi-pribadi yang terlibat dalam situasi tertentu lazimnya menanggapi pelbagai dorongan, yang dapat dimengerti. Dari pengalaman dapat diketahui bahwa tidaklah selalu mungkin untuk memberikan estimasi terhadap kekuatan motif-motif, dan seringkali seseorang tidak pasti dengan penafsirannya sendiri. Hanya hasil akhir konflik akan dapat memberikan dasar kuat untuk mengadakan penilaian. Penilaian terhadap penafsiran yang didasarkan pada hasil-hasilnya, yakni kepastian mengenai proses terjadinya peristiwa aktual, merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana halnya dengan hipotesa pada umumnya. Namun, penafsiran-penafsiran yang dapat dinilai itu hanya dapat diperoleh dengan kecermatan yang rendah terhadap kasus-kasus yang sesuai bagi percobaan-percobaan psikologis, atau melalui data statistik yang bersifat kuantitatif. Sebagai alternatif lain hanya ditemui kemungkinan untuk membandingkan proses-proses historis atau gejala biasa pengalaman sehari-

hari dalam wujud yang sama, namun secara substansial berbeda apabila dipertimbangkan faktor motivasionalnya. Hal itu menjadi ruang lingkup telaah sosiologi perbandingan. Sarana hipotetis murni yang kurang pasti yang mengabaikan pelbagai unsur rangkaian motivasi, akan mengarah pada konstruksi proses peristiwa yang sangat mungkin terjadi, yang mempunyai ciri kausal. Umpamanya, postulat yang dikenal dengan sebutan hukum Gresham merupakan penafsiran rasional terhadap perilaku manusia dalam konteks tertentu yang didasarkan pada hipotesa ideal yang bersifat murni rasional. Sampai sejauh mana suatu perilaku mengikuti hukum Gresham hanya dapat dipastikan atas dasar data statistik mengenai hilangnya uang yang merosot nilainya, dan secara umum pengalaman telah membuktikan sahnya hukum tersebut. Dalam hal ini, pertama-tama data dikumpulkan, kemudian diikuti dengan membuat formulasi suatu generalisasi yang serasi. Namun tanpa penafsiran demikian, tidak mungkin diperoleh pemahaman kausal yang sebenarnya. Di fihak lain, tanpa adanya bukti bahwa aksi yang mengacu pada perilaku yang relatif tetap atau sinambung akan menghasilkan suatu hukum, terlepas dari banyaknya pembuktian teoritis yang dapat diperoleh; hal ini sebenarnya tidak bernilai bagi analisa kongkrit. Dalam hal ini penafsiran teoritis terhadap motivasi dan verifikasi empiris mewujudkan konformitas.

Suatu contoh lain, yakni mengenai teori yang dikembangkan oleh Eduard Meyers mengenai signifikansi kausal peperangan Salamis dan Platea bagi evolusi khas bangsa Yunani dan kebudayaan Barat pada umumnya, tidaklah dapat dibuktikan semudah itu. Pembuktian hanyalah dapat diperoleh dari data yang mengacu pada perilaku orang-orang Persia dalam ka-

sus-kasus di mana mereka mengalami kemenangan, seperti misalnya di Yerusalem, Mesir, dan sebagainya; verifikasi terhadap peristiwa-peristiwa itupun agaknya tidak lengkap. Namun hipotesa ini mendapat dukungan kuat karena secara rasional dapat diterima. Walaupun demikian dalam pelbagai kasus dengan penafsiran-penafsiran historis yang dapat diterima, kemungkinan adanya pelbagai macam bukti masih tampak sebagai kekurangan. Dalam keadaan-keadaan demikian, penafsiran haruslah tetap bersifat hipotetis murni.

Motivasi diartikan sebagai perangkat arti yang ada bagi individu yang terlibat atau pengamat telah merupakan alasan atau dasar yang cukup bagi perilakunya. Suatu derajat pemahaman yang mempunyai arti dan bersifat serasi mengacu pada suatu penafsiran subyektif dari rangkaian proses perilaku yang komponen-komponennya saling berartikulasi dalam konteks-fikiran dan perasaan yang lazim sampai pada titik yang mengandung perangkat arti yang khas. Hal itu lazimnya disebut "benar", dan bukan tipikal. Sebaliknya suatu penafsiran terhadap rangkaian peristiwa yang berurut dianggap kausalitis serasi, apabila berdasarkan pengalaman masa lampau tampaknya hal itu senantiasa terjadi.

Suatu contoh taraf penafsiran yang serasi akan dapat ditemukan pada pemecahan masalah hitungan yang benar, apabila sesuai dengan norma-norma mengenai kalkulasi dan penalaran. Di lain fihak, suatu penafsiran kausal yang serasi terhadap gejala yang serupa harus memperhitungkan kemungkinan statistik yang sejalan dengan generalisasi empiris yang diuji, akan ditemukan pemecahan masalah yang benar atau keliru terhadap masalah yang sama. Walaupun hal itu akan diterima oleh patokan normatif yang

ada, namun hal itu juga akan memperhatikan kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Dengan demikian, maka suatu penjelasan kausal menyatakan bahwa suatu kemungkinan kuantitatif yang jarang terjadi namun selalu merupakan kemungkinan yang dapat diperhitungkan bahwa setiap gejala tertentu yang dapat diamati atau suatu peristiwa subyektif senantiasa diikuti atau disertai peristiwa lainnya.

Suatu penafsiran kausal yang benar terhadap proses perilaku yang kongkrit akan diperoleh apabila perilaku nyata dan motif-motifnya dipastikan adanya secara benar dan bersamaan dengan itu hubungan yang terjadi mempunyai arti tertentu. Suatu penafsiran kausal yang benar terhadap suatu proses perilaku tipikal berarti bahwa proses yang khas itu didasarkan pada penafsiran yang mempunyai arti dan penafsiran kausal yang serasi. Apabila tak ada arti yang terkait pada perilaku tipikal semacam itu, terlepas dari derajat keseragaman atau ketepatan statistik, hal itu tetap masih merupakan kemungkinan statistik yang tidak komprehensif, baik apabila hal itu berkaitan dengan proses yang nyata maupun subyektif. Di lain fihak, suatu arti yang keserasiannya sempurna secara kausal penting dari sudut pandangan sosiologis hanya apabila terbukti bahwa dalam segala keadaan perilaku tersebut secara normal terwujud secara berarti. Agar hal itu terjadi, harus terdapat suatu taraf kesamaan tertentu dengan suatu tipe ideal atau kebiasaan.

Dalam konteks ini, keseragaman statistik mengandung tipe-tipe perilaku yang mudah difahami, misalnya generalisasi sosiologis yang mewujudkan arti subyektif suatu proses perilaku sosial yang dapat dimengerti. Dengan demikian, maka hanya konsep-konsep rasional perilaku subyektif yang mudah di-

fahami yang dapat dianggap sebagai tipe proses empiris menurut pandangan sosiologis apabila hal itu dapat diamati secara empiris dengan suatu derajat kesamaan tertentu. Jarang sekali terjadi, bahwa proses aktual perilaku senantiasa proporsional dengan kejelasan penafsiran subyektif. Dalam setiap hal, hanya pengalaman yang dapat mengungkapkan apakah sesuatu itu benar. Adalah mungkin untuk mendapatkan informasi statistik dari proses yang tidak mempunyai arti maupun yang berarti. Data statistik mengenai curah hujan, angka kematian, produktivitas mesin dan lain sebagainya merupakan contoh-contoh proses yang tidak mempunyai arti. Contoh proses yang mengandung arti adalah angka kejahatan, angka harga-harga, dan lain sebagainya. Contoh terakhir itulah yang merupakan statistik sosiologis.

Proses dan keseragaman yang tidak difahami yang bukan merupakan gejala sosiologis belum tentu tidak penting. Memang hal itu tidak berarti bagi sosiologi yang membatasi diri pada gejala yang secara subyektif dapat difahami yang tidak dipaksa untuk diterima. Proses dan keseragaman yang tidak difahami merupakan suatu kategori yang dipindahkan dari golongan proses yang dapat dimengerti, yang secara metodologis memang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, maka hal-hal itu menjadi kondisi-kondisi, atau dorongan yang mendukung atau menghalangi lingkungan tempat berlangsungnya perilaku tertentu.

Perilaku dalam arti tingkah-laku yang orientasi subyektif yang dapat difahami, hanyalah ada apabila merupakan perilaku seseorang atau beberapa orang. Bagi kepentingan analisa akan bermanfaat atau bahkan penting untuk memandang pribadi sebagai kumpulan sel atau perangkat reaksi biokimiawi, atau

menganggap jiwanya terdiri dari pelbagai elemen tertentu. Hal ini membantu telaah terhadap hubungan kausal.

Walaupun demikian pemahaman subyektif terhadap perilaku unsur-unsur sebagaimana terwujud dalam keteraturan-keteraturan tersebut belum pasti. Elemen-elemen psikis juga tidak dimengerti; semakin pasti definisinya secara ilmiah, semakin menurun pemahaman terhadapnya. Jelas bahwa hal itu tidak mengarah pada penafsiran dalam kerangka pemahaman subyektif. Akan tetapi baik bagi sosiologi maupun sejarah, obyek analisa sesungguhnya haruslah lebih memperdalam arti suatu perilaku. Perilaku unsur-unsur fisiologis tertentu, misalnya, sel-sel, atau suatu jenis elemen tertentu, dapat diamati sedemikian rupa sehingga mengarah pada pembentukan postulat-postulat yang dapat diterapkan pada gejala yang secara individual seragam. Akan tetapi pemahaman subyektif perilaku mengakui fakta dan keteraturan-keteraturan maupun hal-hal lainnya yang tidak dapat difahami secara subyektif. Hal itu mencakup, misalnya, data fisik, astronomis, geologis, meteorologis, geografis, botanis, zoologis, maupun anatomis dan data yang berkaitan dengan psikopatologi yang tidak mempunyai arti subyektif, atau kondisi-kondisi ilmiah yang mendukung perkembangan teknologis.

Bagi tujuan analisa lainnya, umpamanya untuk tujuan hukum dan praktis, adalah wajar untuk memperlakukan kelompok-kelompok sosial, seperti negara, asosiasi kooperatif, korporasi dagang, maupun yayasan-yayasan sebagai manusia pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban dan sebagai pelaku perilaku yang berarti bagi hukum. Akan tetapi bagi penafsiran sosiologis yang mempunyai arti, organisasi-organisasi semacam itu hanya merupakan hasil peri-

laku tertentu manusia-manusia pribadi, oleh karena hanya mereka yang mampu berperan sebagai pelaku dalam setiap perilaku yang berarti. Walaupun demikian, para sosiolog tidak akan mungkin melepaskan perhatiannya secara mutlak terhadap hal-hal demikian itu. Hal itu disebabkan, oleh karena penafsiran subyektif terhadap perilaku berhubungan dengan konsep-konsep tersebut melalui cara-cara, sebagai berikut :

1. Penafsiran semacam itu seringkali harus bekerja dengan konsep-konsep yang sama atau identik untuk membentuk terminologi umum yang mempunyai arti. Baik terminologi hukum maupun yang biasa mendefinisikan negara sebagai suatu konsep hukum dan suatu gejala perilaku sosial terhadap mana aturan-aturan hukum adalah penting. Akan tetapi bagi tujuan-tujuan sosiologis istilah "negara" tidak harus mencakup komponen-komponen yang menurut hukum adalah penting. Dalam setiap kasus, sosiologi tidak mengakui suatu kepribadian kolektif yang bertindak. Apabila sosiologi mempergunakan istilah-istilah seperti negara, korporasi, keluarga, divisi angkatan darat atau konsep-konsep kolektif lainnya, maka sosiologi tidak hanya memusatkan perhatian terhadap suatu jenis perkembangan alternatif cara-cara perilaku sosial oleh para pribadi. Dengan demikian terminologi hukum yang dipergunakan karena ketepatan dan kebiasaan, mempunyai arti yang sama sekali berbeda.

2. Penafsiran mengenai perilaku juga memperhatikan fakta yang paling penting. Konsep-konsep kolektif yang berasal dari bidang hukum, akal atau gagasan-gagasan teknis lainnya, berarti bagi individu-individu oleh karena hal itu ada atau karena mencerminkan sesuatu yang mempunyai otoritas

normatif. Hal ini tidak hanya benar di kalangan para hakim dan birokrat, akan tetapi juga bagi umum. Para individu mengorientasikan perilakunya pada mereka dan dengan cara demikian hal itu seringkali berarti melaksanakan suatu pengaruh sesungguhnya, yang mendominasi dan bersifat kausal dalam proses perilaku individu-individu tersebut. Hal ini terutama berlaku apabila konsep-konsep tersebut merupakan bagian dari suatu pola positif atau negatif yang diakui. Negara modern mencerminkan aksi-aksi tertentu bagi individu oleh karena orang bertingkah-laku atas dasar kepercayaan bahwa negara itu ada atau harus ada dengan cara demikian untuk memberikan dasar bagi sahnya hukum dan pengambilan keputusan.

3. Akhirnya terdapat suatu metode dari madzhab organis; contohnya yang baik adalah hasil karya Schaeffle dalam *Bau und Leben des sozialen Koerpers.* Madzhab ini berusaha untuk menjelaskan interaksi sosial dengan cara mempergunakan premis suatu keseluruhan dengan apa suatu perilaku manusia berkaitan dan kemudian ditafsirkan. Proses ini sama dengan cara seorang fisiolog menganalisa peranan suatu organ badan tertentu dalam kerangka suatu organisme; artinya, sampai sejauh mana peranan organ tersebut bagi kehidupan seluruh organisme. Kiranya semuanya mengetahui tempat, bentuk maupun ukuran limpa kecil; namun fungsinya tidak diketahui dengan tepat, halmana merupakan kelalaian.

Bagi sosiologi pendekatan demikian penting oleh karena hal itu berguna sebagai titik tolak suatu penyajian, dan sebagai orientasi provisional. Kecuali itu, hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menentukan proses-proses perilaku sosial mana yang diperlukan bagi pemahaman untuk menjelaskan

suatu gejala tertentu. Pada tahap ini tugas sesungguhnya dari sosiologi dimulai.

Pada masalah kolektiva sosial sosiolog berada dalam suatu posisi untuk menciptakan sesuatu yang berada di luar kemampuan untuk menyajikan hubungan fungsional dan keteraturan yang lazimnya ditemukan pada organisme fisiologis atau biologis. Tidak sebagaimana halnya pada proses ilmu pengetahuan alam, maka di sini akan dapat diperoleh penafsiran subyektif perilaku individu-individu yang secara langsung terlibat. Hal itu disebabkan oleh karena hakikat ilmu pengetahuan terbatas pada formulasi keteraturan kausal pada obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa serta pada penjelasan fakta individual dengan cara menerapkannya. Kita semua tidak memahami perilaku sel-sel dengan sesungguhnya, akan tetapi mengakui hubungan fungsionalnya, atas dasar mana dapat disusun suatu generalisasi. Tambahan penjelasan dengan penafsiran yang dapat difahami diperoleh, halmana secara esensial bersifat hipotetis dan cirinya fragmentalis sejauh menyangkut hasil-hasil yang diperoleh dengan cara ini. Walaupun demikian hal itu tetap merupakan penafsiran subyektif yang menghasilkan analisa sosiologis yang dikehendaki karena ciri khususnya.

Sebenarnya tidak pada tempatnya untuk membicarakan sampai sejauh mana perilaku hewan dapat difahami manusia dan sebaliknya; pemahaman demikian sangat tidak pasti sedangkan dalam penerapannya akan timbul pelbagai masalah. Akan tetapi kalau pemahaman tersebut ada, maka dengan perkiraan tertentu akan dapat diformulasikan hubungan antara manusia dengan hewan, baik hewan buas maupun peliharaan. Memang benar ada hewan-hewan

yang memahami perintah-perintah yang diberikan manusia. Hewan-hewan tersebut juga mungkin memberikan reaksi terhadap perintah-perintah tersebut dengan perilaku menentang, menurut, atau mungkin dengan kasih sayang. Reaksi tersebut tidaklah semata-mata bersifat naluriah dan mekanis, namun mempunyai arti tertentu secara sadar dan biasanya didasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pemahaman terhadap perilaku orang-orang bersahaja mungkin juga tidak lebih baik. Namun, manusia tidak mempunyai sarana untuk menentukan keadaan kejiwaan subyektif hewan; kalaupun sarana itu ada, hasilnya sangat tidak memuaskan.

Masalah-masalah psikologi hewan sangat menarik, namun sukar. Sebagaimana diketahui, terdapat organisasi-organisasi sosial hewaniah, seperti, "keluarga" monogami atau poligami, kelompok-kelompok, maupun "negara" dengan pembagian kerja fungsional. Ruang lingkup diferensiasi fungsional yang terdapat pada masyarakat hewan bersifat paralel dengan diferensiasi organis atau morfologis anggota-anggota suatu jenis hewan tertentu. Dengan demikian seorang pengamat dapat menerapkan analisa fungsional, yang memberi kemungkinan padanya untuk mengidentifikasikan hal-hal yang penting bagi ketahanan hewan-hewan tersebut, misalnya, gizi, reproduksi, maupun peranan-peranan tertentu seperti pemimpin kelompok hewan, pengikut-pengikutnya, pekerja-pekerjanya, dan seterusnya. Setiap hal yang berada di luar ruang lingkup hal itu, hanyalah merupakan pendugaan secara spekulatif atau penyelidikan terhadap sampai sejauh manakah kewarisan dan lingkungan saling pengaruh-mempengaruhi, halmana mungkin menimbulkan aneka macam pertentangan, sebagaimana halnya dengan pendapat-pendapat Goethe dan

Weisman. Konsep Weisman mengenai peranan dominan seleksi alamiah didasarkan pada deduksi non empiris. Namun para tokoh ilmu pengetahuan masih sependapat, bahwa reduksi ke taraf analisa fungsional merupakan suatu kebutuhan, yang diharapkan hanya bersifat temporer. Sebagai sosiolog yang ingin diketahui tidaklah hanya perihal pentingnya fungsi pelbagai tipe ketahanan, akan tetapi juga bagaimana, misalnya, teori kewarisan ciri-ciri khas berpengaruh terhadap asal diferensiasi yang timbul, maupun pengaruh pelbagai variabel dalam teori itu. Pertama-tama harus diketahui faktor-faktor manakah yang menentukan bagi terjadinya diferensiasi tipe-tipe khusus dari keadaan yang netral; keduanya, perlu diketahui sebab-sebab seseorang yang terlibat dalam diferensiasi berperilaku sesuai dengan cara-cara yang lazim untuk bertahan dalam kelompok yang mempunyai diferensiasi. Melalui beberapa penelitian eksperimental terbukti bahwa terdapat kemungkinan adanya peranan stimuli kimiawi atau proses Fisiologis seperti misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam bidang gizi, terhadap organisme individual. Namun sulit untuk dapat menduga adanya faktor subyektif walaupun dengan cara menelitinya secara eksperimental.

Suatu penyajian data jiwa hewan sosial yang telah diuji kebenarannya yang didasarkan pada pemahaman yang berarti, dapat dilakukan walaupun sebagai tujuan idealistis dalam batas ruang lingkup yang sangat sempit. Oleh karena itu tidak mungkin untuk mengharap adanya peranan dari sumber ini terhadap pemahaman perilaku sosial manusia. Namun demikian, dalam bidang psikologi hewan analogi dengan manusia harus dipergunakan secara hati-hati, walaupun ada harapan bahwa kelak di kemudian hari analogis biologis akan menimbulkan pendekatan-

pendekatan baru. Misalnya, hal itu akan dapat memberikan jawaban terhadap masalah bagaimana faktor-faktor mekanis dan naluriah harus diperhitungkan pada tahap-tahap awal diferensiasi sosial, apabila dibandingkan dengan faktor-faktor yang secara umum dapat ditafsirkan secara subyektif, dan khususnya yang berkaitan dengan perilaku rasional. Sosiologi interpretatif harus dibentuk agar mampu mengadakan identifikasi bahwa pada perkembangan awal kehidupan manusia faktor-faktor mekanis atau naluriah sangat menentukan, dan pada tahap-tahap selanjutnya faktor-faktor tersebut masih berperan, namun dalam kerangka proses interaksi.

Perilaku tradisional dan terutama perilaku kharismatis seringkali mengandung faktor-faktor kejiwaan sehingga berperan sebagai sarana untuk mengalihkan pelbagai dorongan evolusioner proses sosial. Tipe-tipe perilaku demikian berkaitan erat dengan gejala yang hanya dapat difahami dalam pengartian biologis, atau dimasukkan dalam kerangka tafsir yang tidak lengkap dalam pengartian motif-motif subyektif, yang sebenarnya tergabung dalam biologi. Hal itu sama sekali tidak mengurangi tugas sosiologi untuk memenuhi kewajibannya, walaupun dalam batas-batas yang sangat sempit.

Hasil-hasil karya Othman Spann kaya dengan gagasan-gagasan sugestif, walaupun kekurangan-kekurangan tetap ada, misalnya, dalam masalah penilaian murni yang tidak merupakan bagian dari penyelidikan empiris yang sesungguhnya. Namun dia benar oleh karena memberikan tekanan pada pentingnya pandangan fungsional bagi penelitian awal terhadap masalah sosial; hal itu disebutnya sebagai metode universalis.

Yang sesungguhnya perlu diketahui adalah jenis perilaku manakah yang fungsional dalam rangka ketahanan manusia, dan pentingnya kesinambungan kekhususan budaya dan tipe-tipe perilaku sosial yang berkaitan, sebelum memasuki penelitian terhadap asal mula dan motivasinya. Pertama-tama perlu diketahui peranan seorang raja, pejabat, pengusaha, dan seterusnya. Artinya, perilaku manakah yang khas dan cukup penting untuk diklasifikasikan dalam kategori-kategori tertentu sehingga relevan bagi analisa awal. Hal inilah yang dinamakan penilaian oleh H. Rickert. Akan tetapi hal itu hanya merupakan suatu analisa yang akan dapat dipergunakan untuk memahami perilaku manusia pribadi terdiferensiasi; dengan demikian hal itu dapat dianggap sebagai fungsi khusus sosiologi.

Adalah suatu hal yang keliru untuk memberikan asumsi, bahwa suatu metodologi individualistis juga merupakan dugaan awal dari sistem nilai individualistis. Asumsi ini sama salahnya dengan menyatakan bahwa terdapat kecenderungan pada konsep-konsep sosial untuk mendapatkan ciri rasional atas dasar kepercayaan bahwa motif-motif rasional selalu mendahului atau bahwa rasionalisme secara positif dapat dinilai.

Seorang ekonom sosialis juga dapat bersifat individualistis khususnya untuk keperluan analisa sosiologis. Artinya, hal itu harus dimengerti sebagai dasar perilaku individual. Suatu penyelidikan sosiologis empiris yang sesungguhnya dimulai dengan pertanyaan, apakah yang mendorong fungsionaris-fungsionaris individual dan anggota-anggota suatu komuniti untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung adanya komuniti dan menjamin kelangsungannya. Setiap analisa fungsional formal yang mem-

pergunakan konsep keseluruhan sebagai titik tolak hanya dapat menyusun perencanaan awal bagi penelitian selanjutnya; kalau dilaksanakan secara benar, maka hal itu tidak perlu diragukan lagi.

Pelbagai generalisasi sosiologis yang biasanya disebut hukum ilmiah, seperti misalnya hukum Gresham, sebenarnya merupakan kemungkinan-kemungkinan tipikal yang dibenarkan oleh pengamatan. Asumsinya adalah bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu suatu proses yang diproyeksikan akan terjadi, dapat diterima dalam kerangka motif-motif tipikal dan tujuan subyektif yang khas dari mereka yang terlibat suatu perilaku tertentu. Generalisasi-generalisasi tersebut dapat difahami dan sampai taraf tertinggi definitif sepanjang proses perilaku yang khas dapat difahami dalam arti pemenuhan tujuan rasional murni, atau di mana karena alasan kemudahan metodologis tipe teoritis itu dapat dipergunakan. Dalam hal-hal demikian sarana dan tujuan secara empiris difahami secara jelas, terutama apabila pemilihan sarana tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sepanjang perilaku tersebut berorientasi pada tujuan, maka perilaku itu tidak dapat berganti tujuan. Alasannya adalah mungkin bersifat teknis, oleh karena dengan memberikan tujuan yang dirumuskan dengan jelas, tidak ada sarana lain bagi pribadi-pribadi yang terlibat dalam perilaku demikian. Kasus tersebut dengan jelas menunjukkan betapa salahnya untuk menganggap setiap jenis psikologi sebagai dasar utama penafsiran sosiologis perilaku manusia. Untuk kepastiannya, maka tampaknya setiap orang dewasa ini mempunyai penafsiran masing-masing terhadap psikologi. Tujuan-tujuan metodologis tertentu membenarkan penanganan tipe-tipe proses tertentu yang mencoba

mengikuti prosedur ilmu-ilmu alamiah, yang memisahkan aspek fisik dari aspek psikis suatu gejala tertentu sedemikian rupa sehingga asing bagi disiplin yang menelaah perilaku manusia.

Hasil-hasil penelitian psikologis yang mempergunakan metode ilmu-ilmu alamiah sampai batas-batas tertentu berguna bagi masalah-masalah sosiologis: dan hal ini memang sering terjadi. Namun, penggunaan data psikologis seperti itu harus dibedakan dari setiap penelitian perilaku manusia dalam kerangka arti subyektifnya. Dengan demikian, maka sosiologi tidak mempunyai hubungan yang lebih erat dengan psikologi, apabila dibandingkan dengan hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Kesalahan terletak pada konsep psikis yang menganggap semua yang non-fisik dengan sendirinya bersifat psikis. Padahal, arti sesungguhnya dari pemecahan masalah matematis oleh seseorang bukanlah merupakan suatu proses psikis. Perhitungan rasional yang dibuat seseorang, apakah hal itu merupakan hasil suatu proses perilaku yang direncanakan atau tidak akan menimbulkan kepentingan-kepentingan tertentu, yang bersamaan dengan keputusan yang diambil, tidak menjadi hal yang lebih diterima karena dasarnya adalah pertimbangan psikologis. Akan tetapi justeru hukum-hukum sosiologi dan ekonomi kebanyakan didasarkan pada asumsi-asumsi rasional seperti itu. Di lain fihak, kalau hendak dilakukan penjelasan tentang suatu perilaku irasional secara sosiologis, maka psikologi interpretatif sangat berguna. Namun hal itu tidak mengubah situasi metodologis secara fundamental.

Seringkali dikatakan bahwa sosiologi berusaha untuk membuat formulasi konsep-konsep tipologis dan keteraturan umum suatu proses empiris. Hal ini bertentangan dengan sejarah, yang bertujuan un-

tuk menyusun analisa kausal dan menjelaskan perilaku individu-individu yang dari sudut kebudayaan adalah penting, maupun lembaga-lembaga dan kepribadian orang-orang tertentu. Data yang mendasari konseptualisasi sosiologi secara esensial terdiri dari proses perilaku sama yang relevan sebagaimana juga ditelaah oleh para ahli sejarah. Konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi dibentuk atas dasar premis bahwa hal itu dapat berperan pada penjelasan kausal terhadap gejala-gejala sejarah dan kebudayaan yang dianggap penting. Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu lain yang bertujuan mengadakan generalisasi, ciri konsep sosiologis yang abstrak menyebabkan tidak adanya isi yang secara relatif kongkrit apabila dibandingkan dengan realitas sejarah aktual. Sebaliknya sosiologi memberikan konsep-konsep yang lebih tepat. Ketepatan itu diperoleh dengan cara berusaha mencapai derajat keserasian yang setinggi mungkin pada taraf arti yang sesuai dengan konseptualisasi sosiologis yang telah disinggung di muka. Tujuan itu mungkin dapat dicapai mengenai konsep-konsep yang memformulasikan proses-proses rasional. Namun sosiologi juga berusaha untuk mencakupi pelbagai gejala irasional dalam konsep-konsep teoritis yang serasi pada taraf arti tersebut. Dalam segala hal, sosiologi berusaha untuk memahami gejala-gejala tersebut.

Suatu contoh adalah, bahwa gejala-gejala historis yang sama mungkin mempunyai aspek-aspek feodalistis, patrimonial, sejarah dan kharismatis. Untuk merumuskan konsep yang tepat, maka sosiologi harus merencanakan tipe-tipe ideal atau murni yang sejalan dengan bentuk-bentuk perilaku manusia yang sejenis, halmana melibatkan sosiologi pada usaha mencapai taraf integrasi logis yang setinggi mungkin oleh ka-

rena harus serasi dengan taraf artinya. Namun dalam kenyataannya hal itu tidak selalu dapat terjadi, oleh karena tidak setiap kenyataan dapat dicari padanannya secara ideal. Sudah tentu bahwa sebagai tambahan seorang sosiolog dapat menggunakan tipe-tipe biasa yang mempunyai ciri empiris-statistis. Akan tetapi kalau seorang sosiolog mengacu pada kasus-kasus khas, maka haruslah dimengerti bahwa istilah itu berarti suatu tipe ideal.

Kiranya perlu dicatat bahwa tipe-tipe biasa dalam sosiologi dapat diformulasikan secara lebih tepat sepanjang hal itu menyangkut perilaku yang secara kualitatif sama namun mempunyai derajat yang berbeda. Hal-hal semacam itu memang terjadi, namun dalam kebanyakan hal yang berkenaan dengan jenis perilaku yang penting bagi sosiologi atau sejarah motif-motif yang mempengaruhinya secara kualitatif bersifat heterogin, sehingga tak ada yang sesungguhnya dapat dianggap biasa. Tipe ideal perilaku sosial yang dijumpai dalam teori ekonomi tidak realistis atau bersifat abstrak sepanjang hal itu hanya bertujuan untuk meneliti apa yang terjadi dalam suatu proses perilaku tertentu, yang secara rasional murni berorientasi pada tujuan ekonomis semata-mata. Walaupun demikian, pendekatan semacam itu akan berguna untuk memahami perilaku yang tidak ditentukan secara ekonomis semata-mata, namun paling tidak dipengaruhi oleh aspek tradisional, emosi, kesalahan-kesalahan, dan faktor-faktor non-ekonomis lainnya. Hal ini mungkin terjadi melalui dua cara, yakni:

1. melalui analisa terhadap faktor-faktor ekonomis maupun faktor-faktor lainnya yang terjadi serempak dalam satu kasus atau beberapa kasus;
2. analisa faktor-faktor non-ekonomis dapat dilakukan dengan memberikan tekanan pada kesenjangan antara kejadian aktual dengan tipe ideal.

Dengan demikian, maka konstruksi suatu tipe ideal dari sikap terhadap eksistensi yang tidak nyata yang dipengaruhi mistik, adalah sama dengan proses analisa konsekuensinya bagi hubungan antara individu dengan kehidupan biasa. Semakin khas dan semakin tepat konstruksi suatu tipe ideal, semakin besar taraf abstraknya dan semakin baik kemampuannya untuk melaksanakan fungsi metodologis dalam memformulasikan terminologi secara jelas, maupun untuk merumuskan hipotesa serta menyusun klasifikasi.

Dalam peranannya memberikan atribusi penjelasan kausal kongkrit mengenai peristiwa-peristiwa individual, metode sejarah secara esensial adalah sama. Misalnya, percobaan untuk menjelaskan perang tahun 1866 harus melibatkan suatu rekonstruksi bagaimana Moltke dan Benedek akan bertingkah-laku apabila mereka mempunyai pandangan yang menyeluruh tidak hanya terhadap situasinya sendiri namun juga terhadap lawan-lawannya. Dengan demikian barulah akan dapat dilakukan suatu perbandingan dengan peristiwa-peristiwa aktual dan memformulasikan penjelasan kausal terhadap penyimpangan yang diamati yang dapat dikembalikan pada faktor-faktor seperti, misalnya, kesalahan strategis, kekeliruan dalam penalaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sinipun terdapat suatu konstruksi ideal dan tipikal mengenai aksi rasional.

Walaupun demikian tipe konsep ideal dari sosiologi cirinya berasal tidak hanya dari pandangan obyektif, akan tetapi juga dari pelaksanaannya terhadap proses-proses subyektif. Lazimnya, perilaku nyata berproses pada taraf di bawah sadar dari arti subyektifnya. Manusia yang berperilaku tertentu biasanya hanya merasakannya secara samar-samar. Dalam kebanyakan hal perilakunya dikuasai oleh kebiasaan atau naluri. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu

arti subyektif dari perilaku tersebut meningkat ke taraf kesadaran yang sesungguhnya. Suatu perilaku yang benar-benar disadari dan mempunyai arti sebenarnya, jarang sekali terjadi. Setiap penelitian sejarah dan sosiologis harus memperhitungkan hal itu. Namun, kesulitan ini tidak boleh menghalangi peneliti untuk memformulasikan konsep-konsep melalui klasifikasi tipe-tipe arti subyektif yang dimungkinkan. Kemungkinan itu akan terjadi apabila perilaku secara aktual terjadi berdasarkan artinya yang jelas dan disadari. Secara metodologis seringkali terjadi bahwa peneliti dihadapi alternatif satu-satunya untuk memilih antara pengartian yang jelas atau yang tidak jelas. Pengartian yang jelas mungkin merupakan tipe ideal yang abstrak; namun pada saat itu merupakan pilihan ilmiah yang harus dilakukan.

B. KONSEP PERILAKU SOSIAL

Perilaku sosial mungkin berorientasi pada masa lampau, dewasa ini, atau perilaku masa mendatang dari orang-orang lain. Oleh karenanya hal itu mungkin disebabkan karena adanya rasa dendam pada masa lampau, pertahanan terhadap bahaya yang mengancam dewasa ini atau pada masa-masa mendatang. Orang-orang atau fihak-fihak lain itu mungkin adalah orang-orang yang dikenal atau yang tidak dikenal, atau mungkin merupakan suatu kuantitas tertentu, seperti misalnya, sejumlah uang.

Tidak setiap jenis perilaku, walaupun nyata dan bersifat formal, merupakan perilaku sosial. Sikap-sikap subyektif hanya merupakan perilaku sosial apabila berorientasi ke perilaku fihak-fihak lain. Perilaku keagamaan tidak bersifat sosial apabila perilaku tersebut hanya merupakan doa belaka. Kegiatan ekonomis seseorang bersifat sosial apabila hal itu ada hubungannya dengan fihak yang ketiga.

Tidak setiap tipe hubungan antar manusia mempunyai ciri sosial, namun hanya apabila perilaku individual tersebut secara berarti berorientasi pada perilaku fihak-fihak lain. Dengan demikian, maka tubrukan yang terjadi antara dua pengendara sepeda hanyalah merupakan peristiwa tersendiri yang padanannya adalah suatu musibah alam. Di lain fihak, setiap usaha untuk menghindari tubrukan itu, atau akibatnya (misalnya pertengkaran), merupakan bentuk perilaku sosial.

Perilaku sosial tidaklah identik dengan perilaku seragam beberapa orang atau perilaku yang dipengaruhi fihak-fihak lain. Contoh-contohnya adalah, kalau orang-orang yang sedang menunggu kendaraan umum, masing-masing mengembangkan payung karena hujan turun, atau kalau seseorang terpengaruh oleh perilaku kelompoknya. Contoh terakhir itu merupakan obyek psikologi massa atau psikologi kerumunan yang dikembangkan antara lain oleh Le Bon, yang hasil penelitiannya dikenal dengan nama perilaku yang dikondisikan kerumunan. Perilaku seseorang mungkin terpengaruh karena keanggotaannya pada suatu kerumunan dan kesadarannya akan keanggotaan tersebut. Akibatnya adalah adanya kemungkinan bahwa suatu peristiwa tertentu atau cara berperilaku tertentu dapat membangkitkan emosi dalam situasi kerumunan halmana tidak akan terjadi, apabila individu dengan sepenuhnya menyadari keadaan dirinya. Hal itu tidak dengan sendirinya merupakan hubungan yang berarti antara perilaku pribadi dengan fakta bahwa yang bersangkutan merupakan anggota suatu kerumunan. Perilaku demikian yang merupakan reaksi terhadap kelompok, bukan merupakan perilaku sosial, terutama apabila perilaku tersebut tidak mempunyai orientasi yang dapat dianggap serasi dengan taraf arti tertentu. Perbedaan-per-

bedaan demikian sifatnya sangat luwes. Misalnya, seseorang yang memberikan ceramah mungkin tidak hanya terpengaruh oleh pendengar-pendengarnya, akan tetapi ada kemungkinan bahwa para pendengar yang waktu itu hadir juga saling mempengaruhi. Hubungan-hubungan demikian dapat menimbulkan pelbagai penafsiran.

Perbuatan meniru perilaku fihak lain sebagaimana ditandaskan oleh G. Tarde dengan tepatnya, bukan merupakan perilaku sosial, apabila hal itu bersifat reaktif dan tidak mempunyai orientasi yang berarti terhadap fihak yang ditiru perilakunya. Fakta bahwa seseorang mungkin meniru perilaku orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu, juga bukan merupakan perilaku sosial, walaupun tujuan tersebut bersifat asli. Hal itu disebabkan, oleh karena orientasi orang yang meniru itu tidak tertuju pada fihak yang ditirunya, akan tetapi orientasinya tertuju pada hal yang ditirunya itu. Dengan demikian, maka perilakunya secara kausal ditentukan oleh perilaku fihak lain. Di lain fihak apabila, umpamanya, perilaku ditiru karena merupakan panutan, maka hal itu merupakan perilaku sosial.

Gejala yang merupakan perilaku kerumunan maupun imitasi, merupakan konsep-konsep luwes yang berada di perbatasan perilaku sosial; hal yang sama juga mencakup tipe-tipe perilaku sosial tradisional yang akan dibahas pada bab berikut. Keluwesan itu terjadi, oleh karena orientasi terhadap perilaku fihak lain dan arti perilaku pribadi sendiri tidak selalu dapat ditetapkan secara pasti. Gejala-gejala itu seringkali berlangsung secara tidak sadar atau setengah sadar. Pengaruh semata-mata dan orientasi yang berarti tidak selalu dapat dibedakan secara empiris. Akan tetapi secara konseptual adalah penting untuk mem-

bedakannya, walaupun imitasi reaktif semata-mata paling tidak mempunyai kepentingan sosiologis yang sama dengan tipe-tipe perilaku sosial dalam arti yang sempit. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa sosiologi tidak hanya mencakup perilaku sosial, namun perilaku demikian merupakan ruang lingkup sentral dan merupakan bagian yang sangat penting dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan.

C. BENTUK—BENTUK KARAKTERISTIK PERILAKU SOSIAL.

Sebagaimana halnya dengan bentuk-bentuk perilaku lainnya, maka perilaku sosial dapat ditetapkan dengan pelbagai cara. Cara pertama dapat diklasifikasikan sebagai rasional dan berorientasi terhadap suatu tujuan. Dalam hal ini, maka klasifikasi itu didasarkan pada harapan bahwa obyek-obyek dalam situasi eksternal atau pribadi-pribadi lainnya akan berperilaku tertentu, dan dengan mempergunakan harapan-harapan seperti kondisi atau sarana demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah dipilih secara rasional oleh pribadi-pribadi itu. Hal itu dapat disebut sebagai perilaku yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua adalah, bahwa perilaku sosial dapat diklasifikasikan oleh kepercayaan secara sadar pada arti mutlak perilaku, sedemikian rupa, sehingga tidak tergantung pada suatu motif tertentu dan diukur dengan patokan-patokan tertentu, seperti etika, estetika, atau agama. Orientasi rasional terhadap suatu nilai mutlak disebut perilaku yang terkait dengan nilai. Yang ketiga adalah perilaku sosial yang diklasifikasikan sebagai sesuatu yang bersifat afektif atau emosional, yang merupakan hasil konfigurasi khusus dari perasaaan pribadi. Yang keempat merupakan perilaku sosial yang diklasifikasikan sebagai tradisional, yang telah menjadi adat-istiadat.

Perilaku tradisional dalam arti sempit sebagaimana halnya dengan tipe reaktif imitasi, seperti yang dijelaskan dalam bab I di muka, terletak diperbatasan atau kadang-kadang melintasi perilaku berorientasi yang mempunyai arti. Kadang-kadang itu hanya merupakan suatu reaksi sederhana yang mungkin bersifat serta-merta, yang sebenarnya merupakan suatu reaksi terhadap dorongan biasa yang mengarahkan perilaku secara rutin. Hal ini mencakup tugas-tugas rutin yang dilakukan manusia setiap hari. Namun, hal itu juga mungkin terjadi atas dasar kesadaran diri, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perilaku yang berkaitan dengan nilai.

Perilaku afektif kadang-kadang juga melintasi batas perilaku yang dianggap berorientasi dan mempunyai arti. Hal itu mungkin terjadi, umpamanya, pada reaksi lepas terhadap dorongan-dorongan luar biasa. Gejala itu merupakan suatu sublimasi, yakni apabila perilaku afektif terwujud dalam bentuk pelepasan secara rasional dari ketegangan-ketegangan emosional. Apabila hal itu terjadi, maka biasanya gejala itu menuju pada perilaku yang berkaitan dengan nilai, atau perilaku yang secara rasional berorientasi pada tujuan, ataupun kedua-duanya.

Perilaku yang berkaitan dengan nilai berbeda dengan perilaku afektif. Dasar perbedaannya adalah formulasi yang sadar terhadap nilai-nilai yang menguasai perilaku itu dan orientasi terencana yang konsisten pada nilai-nilai tersebut. Namun kedua hal itu mempunyai persamaan, yakni bahwa arti perilaku tidaklah terletak pada pencapaian tujuan tertentu, akan tetapi pada keterlibatan dalam perilaku tertentu demi perilaku itu. Perilaku yang mempunyai dasar afektif merupakan jenis perilaku yang menuntut pemenuhannya seketika terhadap dorongan ter-

tentu dengan tujuan untuk membalas dendam, bersikap pasrah terhadap fihak lain, dan juga untuk menyalurkan ketegangan.

Beberapa contoh perilaku yang secara murni berkaitan dengan nilai-nilai, adalah perilaku manusia, tanpa memperhitungkan akibatnya, berusaha untuk mewujudkan hal-hal yang telah diyakininya. Hal itu adalah, umpamanya, masalah-masalah yang berhubungan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan demi kehormatan, keindahan, kepercayaan, dan lain sebagainya, tanpa melihat tujuannya. Perilaku demikian lazimnya dilakukan atas dasar perintah dari fihak-fihak yang dianuti. Hanya perilaku yang berorientasi pada tuntutan-tuntutan semacam itu yang merupakan perilaku yang berorientasi pada nilai-nilai mutlak. Perilaku itu harus dianggap sebagai tingkah laku tipe yang khas.

Perilaku rasional tergolong dalam jenis yang berorientasi pada tujuan, apabila memperhitungkan tujuan, sarana, dan akibat-akibat sekundernya. Perilaku demikian juga harus mempertimbangkan pilihan-pilihan yang tersedia, hubungan antara tujuan dengan kemungkinan-kemungkinan mempergunakan sarana lain, serta kepentingan relatif dari pelbagai tujuan yang mungkin ingin dicapai. Tipe perilaku ini tak dapat dicari padanannya dengan perilaku afektif dan tradisional. Keputusan yang diambil untuk memilih antara pelbagai tujuan dan hasil yang dicapai, mungkin dapat ditentukan atas dasar pertimbangan nilai-nilai. Dalam hal demikian, maka perilaku itu hanya berorientasi pada tujuan sepanjang mengenai pemilihan sarana.

Perilaku yang berorientasi pada nilai itu dapat dikaitkan dengan perilaku yang berorientasi pada tu-

juan, dengan pelbagai cara. Dari sudut pandangan perilaku yang berorientasi pada tujuan, maka orientasi pada nilai memerlukan irasionalitas yang lebih banyak, kalau nilai-nilai sifatnya semakin mutlak. Hal itu disebabkan, oleh karena semakin tinggi taraf rasa pasrah, semakin kurang pertimbangan terhadap akibat-akibatnya. Dengan demikian, maka perilaku yang secara mutlak berorientasi pada tujuan hanyalah merupakan suatu pengecualian konstruktif.

Jarang sekali terjadi, bahwa suatu perilaku, teristimewa perilaku sosial, yang hanya mempunyai orientasi tunggal. Tipe-tipe bentuk-bentuk perilaku tersebut dimuka juga tidak bersifat tuntas. Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh tipe-tipe bentuk murni secara konseptual, yang penting bagi sosiologi. Memang perlu diakui bahwa keberhasilan klasifikasi itu di masa depan akan menentukan kegunaannya.

D. TIPE—TIPE PERILAKU SOSIAL.

Persamaan-persamaan faktual akan dapat dijumpai dalam ruang lingkup perilaku sosial. Artinya, terdapat proses perilaku tertentu yang diulang-ulang manusia dalam kerangka arti yang sama dan secara simultan melibatkan sejumlah manusia. Sosiologi menelaah tipe-tipe perilaku semacam itu, halaman agak bertentangan dengan sejarah yang memperhatikan hubungan-hubungan kausal yang penting, yang hanya merupakan peristiwa tunggal belaka.

Suatu keseragaman orientasi perilaku sosial aktual disebut kebiasaan, apabila perwujudannya semata-mata didasarkan pada aktualitas perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan disebut adat-istiadat, kalau pola tersebut telah ber-

langsung lama sekali sehingga merupakan tradisi. Kalau suatu kebiasaan ditentukan oleh fakta bahwa perilaku semua fihak terarah pada harapan-harapan identik, maka gejala itu disebut kebiasaan yang ditentukan oleh situasi kepentingan diri para pribadi.

Ragam atau gaya merupakan bagian dari kebiasaan. Ragam atau gaya terdapat, kalau hal itu dimotivasikan oleh kebaruannya, dan bukan oleh kelestariannya sebagaimana halnya dengan adat-istiadat. Ragam atau gaya berada dalam ruang lingkup konvensi, oleh karena didasarkan pada keinginan mendapatkan prestise sosial.

Adat-istiadat, berbeda dari konvensi dan hukum, terdapat apabila ada aturan dipatuhi secara tidak sadar atau karena kebiasaan belaka. Akan tetapi fihak-fihak lain senantiasa mengharapkan bahwa aturan tersebut ditaati. Dengan demikian transisi dari adat-istiadat ke hukum bersifat gradual. Di manapun juga, pewarisan secara tradisional memperoleh wewenang atau kewibawaan tertentu yang dianggap sah. Dewasa ini makan pagi merupakan adat-istiadat; namun hal itu tidaklah diharuskan. Di lain fihak, cara berpakaian tidak hanya didasarkan pada adat istiadat, namun telah menjadi konvensi.

Tidak semua persamaan pada proses perilaku sosial didasarkan pada orientasi terhadap kaidah atau kebiasaan yang sah. Namun hal itu lebih banyak didasarkan pada fakta bahwa suatu tipe perilaku sosial paling baik disesuaikan dengan kepentingan para fihak yang terlibat sebagaimana hal itu dipersepsikan oleh mereka. Hal ini misalnya, akan tampak pada perilaku ekonomis yang antara lain terwujud dalam keseragaman harga dalam pasaran bebas.

Para distributor berperilaku sebagai suatu sarana mendapatkan kepuasan yang dirumuskan atas dasar keyakinannya terhadap kepentingan ekonomisnya dan bersamaan dengan itu menganggap harapan-harapan yang ada sebagai suatu kondisi yang sesuai dengan prospeksi yang ada. Dengan demikian, maka semakin ketat perilaku dikaitkan pada orientasi tujuan, semakin cenderung terjadi reaksi yang sama terhadap situasi yang sama pula. Oleh karena itu timbullah persamaan atau keseragaman, keteraturan, dan kesinambungan sikap dan perilaku yang lebih tetap, kalau dibandingkan dengan perilaku yang berorientasi pada suatu sistem kaidah yang dianggap sebagai faktor pengikat kelompok. Gejala tersebut sangat penting bagi bidang ekonomi, dan pengamatan terhadap gejala itu dapat dianggap sebagai asal mula timbulnya ekonomi sebagai ilmu pengetahuan. Akan tetapi hal itu sebenarnya sama bagi semua jenis perilaku. Tipe gejala tersebut merupakan antitesis langsung dari setiap keterikatan serta merta terhadap norma-norma yang berproses secara rutin, dan juga dari pemujaan terhadap kaidah-kaidah yang secara sadar diterima sebagai nilai-nilai mutlak. Suatu komponen esensial rasionalisasi perilaku adalah substitusi keterikatan serta merta terhadap adat-istiadat kuno, dengan adaptasi terencana terhadap situasi-situasi kepentingan diri. Sudah tentu bahwa hal itu bukan merupakan suatu kegiatan untuk mentuntaskan konsep reasionalisasi perilaku. Hal itu disebabkan, oleh karena di samping itu, maka perilaku demikian mungkin secara positif melanggar realisasi nilai-nilai mutlak secara sadar. Secara negatif, hal itu memperlakukan rasionalitas yang bebas penilaian, dengan mengorbankan adat-istiadat, nilai-nilai emosional, dan kepercayaan terhadap nilai-nilai mutlak.

Stabilitas adat-istiadat secara esensial didasarkan pada fakta bahwa apabila seseorang tidak menyesuaikan perilakunya pada adat-istiadat, maka akan timbul kesulitan-kesulitan yang akan mengganggu kehidupannya. Hal itu akan terjadi, selama mayoritas menganuti adat-istiadat itu. Demikian pula halnya dengan stabilitas setiap perilaku dalam artian kepentingan diri; kalau yang bersangkutan tidak memperhitungkan kepentingan fihak lain, maka dia mengundang permusuhan fihak lain tersebut halmana akan menghancurkan kepentingannya sendiri.

BAHAN PUSTAKA ACUAN

Freund, Julien, *The Sociology of Max Weber* (Penerjemah Mary Ilford). New York: Vintage Books, 1969.

Gerth, H.H. dan wright Mills (Penerjemah dan editor). *From Max Weber: Essays in Sociology.* London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd. 1947.

Secher, H.P. *Concepts in Sociology by Max Weber.* New York : The Citadel Press, 1962.

BAB III
HUBUNGAN SOSIAL

A. KONSEP HUBUNGAN SOSIAL.

Pengartian hubungan sosial dipergunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dalam mana dua orang atau lebih terlibat dalam suatu proses perilaku. Proses perilaku tersebut terjadi berdasarkan tingkah-laku para fihak yang masing-masing memperhitung-kan perilaku fihak lain dengan cara yang mengandung arti bagi masing-masing. Dengan demikian, maka hu-bungan sosial berisikan kemungkinan bahwa para pri-badi yang terlibat dalamnya akan berperilaku dengan cara yang mengandung arti serta ditetapkan terlebih dahulu. Adanya kemungkinan tersebut sebenarnya tidak penting sepanjang mengenai sebab-sebabnya; yang penting adalah eksistensinya.

Dengan demikian, maka kriterium yang penting menuntut adanya orientasi mutual minimal perilaku masing-masing fihak terhadap fihak yang dihubungi-nya. Isinya mungkin mencakup konflik, sikap bermu-suhan, daya tarik seksual, persahabatan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Di lain fihak, isinya adalah mung-kin menyangkut pemenuhan suatu kebutuhan, pe-ngelakan terhadap kewajiban, ketegasan agar menta-

ati perjanjian, dan seterusnya. Kadang-kadang hal itu mencakup juga keanggotaan pada kelas atau bangsa yang sama. Namun perlu dicatat, bahwa keanggotaan kelompok semata-mata, mungkin tidak berisikan suatu perilaku sosial. Selanjutnya perlu juga diperhatikan, bahwa batasan hubungan sosial tidak berisikan informasi mengenai taraf solidaritas (atau gejala yang merupakan lawannya) yang menjadi ciri fihak-fihak yang terlibat dalam perilaku tertentu.

Secher berpendapat, (H.P. Secher 1969: 63)

> "It is always a case, if used in this context, of the meaning imputed to those individuals involved in a given concrete situation, either on the average or in a theoretically constructed pure type-but it is never a case of normatively "correct" or "metaphysically "true" meaning".

Hubungan sosial juga terdapat dalam kasus-kasus suatu organisasi sosial seperti negara, gereja, asosiasi, perkawinan dan seterusnya, oleh karena ada suatu perilaku atau perilaku yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Hal ini perlu ditegaskan untuk mencegah terjadinya konsep-konsep yang kosong belaka, halmana merupakan suatu kemerosotan ilmiah.

Dengan demikian, pengartian "negara" secara sosiologis akan kehilangan relevansinya, kalau ada kemungkinan bahwa negara tersebut berkurang peranannya dalam mewujudkan perilaku sosial yang mempunyai arti serta orientasi tertentu.

Semua fihak yang secara mutual berorientasi dalam suatu hubungan sosial tertentu tidak harus mewujudkan pengartian subyektif yang sama mengenai hal itu. Misalnya, sikap manusia terhadap persaha-

batan, cinta, kesetiaan, kepercayaan kontraktual, mungkin berbeda-beda. Bagi fihak-fihak yang terlibat, maka perilaku masing-masing hanya memperlihatkan pelbagai bentuk dan arti, sedangkan hubungan sosialnya bersifat asimetris. Walaupun demikian, mereka mungkin mempunyai orientasi mutual sepanjang salah-satu fihak mempunyai sikap yang senantiasa memperhitungkan fihak lain atau dengan cara menyesuaikan dengan sikap fihak lain. Terlepas dari kenyataan bahwa mungkin terjadi kesalahan pada harapannya, namun hal itu akan menghasilkan proses perilaku tertentu yang mempunyai akibat terhadap bentuk hubungan itu. Secara obyektif dapatlah dikatakan bahwa suatu hubungan simetris hanya ada kalau dalam pengharapan-pengharapan terhadap hubungan tersebut ada persamaan-persamaan pengartian mengenai sifat hubungan tersebut. Misalnya, sikap aktual seorang anak terhadap ayahnya mungkin adalah sesuai dengan apa yang diharapkan ayah. Hubungan sosial yang berisikan orientasi penuh terhadap fihak lain dan sebaliknya, jarang sekali terjadi.

Sesuai dengan tolok ukur yang diberikan, maka tidak adanya resiprositas akan meniadakan adanya hubungan sosial, hanya kalau orientasi mutual itu benar-benar tidak ada dalam perilaku masing-masing fihak. Dalam hal ini, maka semua kasus transisional merupakan aturan-aturannya dan bukan merupakan suatu pengecualian.

Suatu hubungan sosial mungkin bersifat transitor atau mempunyai derajat keteraturan yang berbeda-beda. Artinya, mungkin terdapat pengulangan perilaku yang terkait dengan arti subyektifnya sehingga memang diharapkan. Akan tetapi untuk menghindarkan terjadinya kesan yang keliru, perlu dicatat bahwa hal itu hanya merupakan bukti adanya kemung-

kinan bahwa suatu bentuk perilaku tertentu akan terjadi halmana membuktikan adanya suatu hubungan sosial. Dengan demikian, apabila suatu persahabatan itu ada, maka artinya adalah bahwa dalam pertimbangan pengamat terdapat kemungkinan bahwa sikap-sikap subyektif tertentu yang sudah dikenal lazimnya akan menghasilkan bentuk-bentuk perilaku tertentu, khususnya dalam masalah persahabatan itu. Weber kemudian menyatakan (H.P. Secher 1962:65)

> "The unavoidable alternative, from the legal point of view: whether or not a rule of law is endowed with legal validity and a legal relationship therefore can be assumed to exist, such a simple alternative is not relevant to sociological problems".

Arti subyektif hubungan sosial dapat berubah, misalnya, suatu hubungan politis yang semula didasarkan pada solidaritas, mungkin berubah dasarnya menjadi konflik. Namun, hal itu hanyalah merupakan masalah terminologis dan kesinambungan perubahan, apakah terjadi suatu perubahan, atau apakah yang lama tetap ada akan tetapi artinya yang berubah. Arti itu sendiripun mungkin mengalami proses antara konstannya arti dengan sifatnya yang permanen.

Isi yang mempunyai arti yang relatif konstan dalam hubungan sosial dapat diungkapkan dalam beberapa aksioma yang paling tidak dianuti oleh para fihak-fihak yang mengadakan hubungan itu. Hal itu mungkin terjadi pada hubungan-hubungan yang lebih rasional, apabila dibandingkan dengan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan nilai-nilai atau tujuan-tujuan. Kemungkinan menyusun formulasi arti subyektif secara rasional semakin mengecil kalau hubungan didasarkan pada emosi atau perasaan.

Arti suatu hubungan sosial dapat disepakati atas dasar persetujuan mutual. Artinya, para fihak yang terlibat dalam suatu hubungan membuat perjanjian mengenai perilakunya di masa depan. Dengan demikian, maka setiap fihak dalam keadaan normal dan selama dia berperilaku rasional, akan dianuti oleh fihak lain dengan siapa dia berhubungan dan akan menyesuaikan diri dengan pemahamannya terhadap kesepakatan yang telah ada. Dengan demikian maka untuk sebagian perilaku berorientasi pada tujuan dan dia ingin berpegang pada orientasi tersebut. Namun, untuk sebagian perilakunya berorientasi pada nilai-nilai; artinya, dia wajib mentaati persetujuan yang telah ada, sejauh dia memahami kesepakatan itu, sehingga mungkin diadakan suatu antisipasi.

B. KONSEP PERJUANGAN.

Suatu hubungan sosial dinamakan perjuangan apabila perilaku salah-satu fihak secara sengaja berorientasi pada pelaksanaan keinginannya terhadap perlawanan fihak lain atau fihak-fihak lain. Kalau sarana perjuangan tidak mencakup kekerasan fisik aktual, maka proses tersebut disebut perjuangan damai. Perjuangan itu dinamakan pertentangan (kompetisi) kalau dilaksanakan secara damai dan formal untuk menguasai kesempatan-kesempatan dan keuntungan-keuntungan yang juga diperjuangkan oleh fihak-fihak lain. Suatu pertentangan merupakan kompetisi terkendali apabila sarana dan tujuannya dikuasai oleh pemegang wewenang yang sama. Perjuangan sosial atau individual yang seringkali bersifat laten untuk mendapatkan keuntungan atau untuk bertahan yang tidak harus didasarkan pada konflik kepentingan, disebut seleksi. Apabila masalahnya menyangkut kesempatan-kesempatan yang diperoleh pribadi selama hidupnya, maka hal itu merupakan bentuk se-

leksi sosial. Selama masalahnya menyangkut pelbagai kemungkinan bertahannya ciri-ciri secara turun-temurun, maka hal itu merupakan bentuk seleksi biologis.

Pelbagai variasi tahap transisional akan dapat ditemukan, yang berkisar antara peperangan yang bertujuan memusnahkan musuh, sampai pada peperangan yang didasarkan pada aturan-aturan konvensional. Contoh-contoh lainnya adalah pertentangan untuk menikah dengan seorang wanita, persaingan ekonomis di pasaran, persaingan untuk mendapatkan hadiah-hadiah kesusasteraan, dan lain sebagainya.

Semua bentuk perjuangan dan semua cara bersaingan yang terjadi akan dilanjutkan dengan proses seleksi memilih mereka yang mempunyai kualitas tertinggi yang diperlukan bagi tercapainya suatu keberhasilan. Hakikat kualitas tersebut ditentukan oleh kondisi pertentangan yang mencakup sistem wewenang terhadap manusia berorientasi karena tradisi, kepercayaan maupun kebiasaan. Dengan demikian kualitas tersebut mungkin mencakup kekuatan fisik, kemampuan pribadi yang tinggi, keaslian, dan seterusnya. Setiap tipe wewenang mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap kesempatan-kesempatan dalam seleksi sosial.

Tidak setiap proses seleksi sosial merupakan suatu perjuangan. Seleksi sosial hanya berarti bahwa kualitas-kualitas pribadi tertentu lebih disukai untuk mencapai keuntungan-keuntungan dalam hubungan sosial. Apakah keuntungan-keuntungan tersebut diperoleh melalui perjuangan, tidak dapat ditentukan dari proses seleksi sosial. Apakah hal itu akan mempengaruhi ketahanan biologis untuk hidup, juga tidak dapat ditentukan.

Pengartian perjuangan hanya ada apabila pertentangan berlangsung secara murni. Hanya dalam pengartian seleksi akan muncul timbul pengetahuan, bahwa terjadinya perjuangan tak akan dapat dicegah, terutama dalam seleksi biologis. Seleksi bersifat abadi, oleh karena tidak ada upaya yang akan dapat menghapuskannya atau menggantinya dengan hal lain. Bahkan dalam suasana berprosesnya wewenang damai ada kemungkinan untuk mengatur sarana, arah maupun tujuan perjuangan hanya dengan cara menangani setiap tipe secara terpisah. Hal ini berarti adanya cara-cara lain untuk berjuang sehingga mencapai kemenangan, apabila proses kompetisi tetap terbuka. Walaupun dapat diasumsikan secara utopis bahwa pertentangan dapat dihilangkan, kondisi demikian tetap akan mengarah pada proses seleksi yang bersifat laten, baik yang bersifat sosial maupun biologis, yang mempunyai kecenderungan untuk memilih tipe yang paling besar kemampuan penyesuaiannya dengan kondisi-kondisi itu, tanpa memperhatikan kualitas lingkungan atau kewarisan. Seleksi sosial secara empiris dan seleksi biologis secara prinsipiel, merupakan faktor-faktor yang menghalangi penghapusan perjuangan secara sempurna.

Secara alamiah perlu dibedakan antara perjuangan dan proses seleksi dalam hubungan sosial dengan perjuangan pribadi untuk bertahan dan berhasil. Konsep-konsep tersebut hanya dapat diterapkan secara metaforis terhadap hubungan-hubungan sosial. Hal itu disebabkan, oleh karena hubungan-hubungan hanya ada sebagai sistem-sistem perilaku manusia dengan arti tertentu yang subyektif. Oleh karena itu proses seleksi atau perjuangan menunjukkan adanya tipe perilaku tertentu yang dikesampingkan oleh tipe perilaku lain, baik yang dilakukan oleh orang

yang bersangkutan ataupun oleh orang lain. Hal ini berlangsung melalui pelbagai cara. Pertama-tama perilaku manusia tertuju pada perubahan hubungan-hubungan sosial tertentu secara sadar atau pada pencegahan terjadinya maupun kelangsungannya secara abadi. Misalnya, suatu negara mungkin hancur karena perang atau revolusi, atau pengkhianatan, dan seterusnya. Hubungan sosial mungkin dipengaruhi penanganan yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Tujuan-tujuan itu mungkin dapat dicapai oleh pribadi atau kelompok. Yang kedua hal itu mungkin merupakan hasil sampingan proses perilaku manusia yang tidak disengaja dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya hal itu, yang menumbuhkan hubungan-hubungan sosial tertentu dengan kesempatan yang lebih sempit untuk sinambung atau untuk menciptakan hal yang baru sama sekali. Semua perubahan alam dan kondisi sosial mempunyai pengaruh tertentu terhadap kesempatan bertahannya hubungan sosial. Secara bebas hal itu dapat ditafsirkan dengan proses seleksi. Umpamanya, negara terkuat yang paling besar kemampuannya untuk menyesuaikan diri, akan keluar sebagai pemenang. Namun perlu diingatkan bahwa apa yang disebut seleksi tidak ada hubungannya dengan seleksi tipe-tipe manusia dalam arti sosial maupun biologis. Dalam setiap kasus perlu diadakan penyelidikan terhadap sebab-sebab timbulnya perubahan pada kesempatan untuk bertahan. Penjelasan mengenai sebab-sebab itu mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sehingga tidak mungkin dicakup dalam satu pengartian. Kalau hal itu dipaksakan juga, maka akan timbul kesulitan oleh karena masuknya penilaian tidak kritis dalam penelitian empiris, sehingga terjadi generalisasi empiris yang hanya didasarkan pada peristiwa-peristiwa insidental. Sayang bahwa

hal itu masih banyak terjadi akhir-akhir ini. Fakta bahwa dalam suatu situasi khusus terjadi penghapusan hubungan sosial, tidak memberikan kejelasan mengenai nilai ketahanan hubungan tersebut.

C. KOMUNALISASI DAN AGREGASI HUBUNGAN—HUBUNGAN SOSIAL.

Komunalisasi hubungan-hubungan sosial terjadi, apabila proses itu didasarkan pada rasa solidaritas, yang merupakan hasil keterikatan secara emosional atau tradisional. Agregasi hubungan-hubungan sosial merupakan hasil rekonsiliasi dan keseimbangan kepentingan-kepentingan yang dimotivasikan oleh penilaian secara rasional atau kebiasaan. Agregasi mungkin didasarkan pada persetujuan rasional yang dihasilkan kesepakatan mutual. Dalam hal demikian, maka perilaku agregatif berorientasi pada nilai, atau pada tujuan yang masing-masing dilandaskan pada kepercayaan terhadap keterikatan yang harus dipatuhi serta harapan bahwa fihak lain akan menyesuaikan dirinya.

Bentuk hubungan agregatif yang paling murni dapat ditemukan pada:

1. kompromi antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan, namun bersifat komplementer.
2. perserikatan sukarela yang murni yang didasarkan pada kepentingan diri yang tujuannya adalah meningkatkan kepentingan materiel tertentu.
3. perserikatan sukarela yang didasarkan pada nilai-nilai ideologis yang mutlak.

Komunalisasi mungkin didasarkan pada setiap bentuk hubungan emosional, afektif ataupun tradisional. Tipe hubungan ini lazimnya dijumpai pada

hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Sudah tentu bahwa kebanyakan hubungan sosial mengandung faktor-faktor komunal maupun agregatif. Setiap hubungan sosial yang berada di luar tujuan memenuhi tujuan-tujuan yang segera dapat dipenuhi mempunyai derajat keajegan tertentu yang tidak dapat dibatasi pada sifat alamiahnya. Kecenderungan itu dapat diamati dalam suatu unit militer yang sama atau kelas sekolah yang sama, atau kantor atau toko, walaupun intensitas komunalisasinya berbeda. Sebaliknya adalah mungkin bagi suatu hubungan sosial yang komunal sifatnya, untuk mewujudkan suatu tipe perilaku di kalangan anggota-anggotanya, yang sebagian atau seluruhnya dimotivasikan oleh kebiasaan.

Dengan demikian secara normal pengartian komunalisasi dipergunakan sebagai lawan perjuangan. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa paksaan aktual tidak dijumpai dalam suatu hubungan komunal (apalagi kalau suatu kelompok lebih maju daripada kelompok lainnya). Dalam hubungan-hubungan komunal mungkin juga timbul proses seleksi, yang menimbulkan perbedaan-perbedaan pada kesempatan dan ketahanan. Di lain fihak, agregasi hanya merupakan pencerminan rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, dalam mana hanya sebagian dari obyek atau sarana perjuangan dihilangkan; namun konflik kepentingan yang nyata dengan persaingan untuk memperoleh kesempatan tetap tidak berubah. Perjuangan dan komuniti merupakan konsep-konsep yang relatif. Di dalam kenyataan terdapat pelbagai bentuk perjuangan halmana tergantung pada sarana yang dipergunakan yang bersifat damai atau penuh kekerasan. Sebagaimana dinyatakan di muka, maka setiap tipe wewenang yang berkuasa

atas perilaku sosial memberikan ruang gerak bagi proses seleksi ideal dalam bentuk persaingan antara manusia.

Perlu dicatat pula bahwa kualitas yang sama, atau situasi yang sama ataupun cara berperilaku yang sama dengan sendirinya merupakan suatu hubungan sosial komunal. Misalnya, adanya karakteristis biologis yang sama atas dasar keturunan merupakan potensi bagi timbulnya diskriminasi rasial yang bukan merupakan hubungan sosial komunal. Kalaupun suatu kelompok mempunyai reaksi yang sama terhadap suatu situasi tertentu tidak dengan sendirinya merupakan hubungan komunal, walaupun ditimbulkan oleh perasaan yang sama terhadap situasi tertentu dengan segala konsekuensinya. Hubungan komunal hanya terdapat apabila perasaan itu berorientasi terhadap perilaku masing-masing terhadap sesamanya.

Komuniti bahasa timbul sebagai akibat persamaan tradisi melalui keluarga dan lingkungan sosial, mempermudah pemahaman mutual dan mendorong ke arah terjadinya derajat paling tinggi dari hubungan sosial. Bahasa sendiri tidak cukup untuk menimbulkan komunalisasi; fungsinya hanya mempermudah komunikasi sehingga menimbulkan peningkatan taraf agregatif. Hal itu terjadi dengan adanya kontak antar individu, bukan karena mempergunakan bahasa yang sama, akan tetapi oleh karena terjadi penyerasian antara kepentingan-kepentingan yang berbeda. Orientasi terhadap aturan-aturan bahasa yang sama terutama berguna untuk mengadakan komunikasi, namun tidak cukup untuk memberikan isi pada hubungan sosial. Menurut Weber, maka (H.P. Secher 1962 : 94)

"It is only the emergence of conscious differences vis-a-vis other persons, that the fact of two individuals speaking a different language and in this respect sharing a common situation can lead them to experience a feeling of community and create modes of social organization that are consciously based on the sharing of a common language".

Partisipasi dalam suatu pasaran merupakan tipe yang berbeda pula. Hal itu mendorong agregasi bermacam-macam individu untuk melibatkan diri dalam perbuatan saling tukar-menukar dalam suatu hubungan sosial, khususnya dalam persaingan, antara pembeli prospektif, yang perilakunya harus saling berorientasi secara mutual. Di luar itu agregasi hanya terjadi sepanjang proses masuknya beberapa peserta dalam suatu perjanjian untuk memperoleh keuntungan, atau untuk mengatur semua transaksi sehingga menguntungkan mereka. Dengan demikian, maka pasaran bebas dan ekonomi kompetitif, merupakan tipe pengaruh atau perilaku resiprokal dalam kerangka kepentingan diri yang murni yang menjadi ciri ekonomi modern.

D. HUBUNGAN SOSIAL TERBUKA DAN TERTUTUP.

Suatu hubungan sosial, baik yang bersifat komunal ataupun agregatif, mungkin bersifat terbuka bagi kalangan luar, apabila ikut sertanya fihak-fihak tersebut dalam orientasi perilaku sosial mutual yang relevan bagi arti subyektifnya, tidak dilarang oleh wewenang yang berkuasa. Hubungannya bersifat tertutup, kalau hal itu dilarang, dibatasi atau terikat pada syarat-syarat tertentu. Sifat keterbukaan atau tertutupnya hubungan sosial tertentu, mungkin didasarkan pada sikap-sikap tradisional atau afektif,

atau hal itu mungkin dilandaskan pada nilai-nilai atau kebiasaan. Dalam keadaan-keadaan tertentu hubungan sosial bersifat tertutup secara rasional. Kalau hubungan terbuka akan meningkatkan nilai kepuasan, misalnya, maka keterbukaan akan tetap dipertahankan. Apabila peningkatan kualitas keadaan didasarkan pada cara-cara monopolistis, maka ada kecenderungan untuk mempertahankan ketertutupan. Suatu hubungan sosial yang tertutup sifatnya akan dapat mempertahankan monopolinya melalui cara-cara:

1. membiarkan terjadinya persaingan bebas antara fihak-fihak dalam kelompok itu.
2. mengatur atau memberikan alokasi terhadap keuntungan-keuntungan yang diperoleh.
3. mempertahankan keserasian hubungan yang telah ada.

Cara yang ketiga merupakan suatu upaya untuk menutup diri, yang biasanya disebut hak. Dalam usaha mempertahankan sistem wewenang yang ada hak-hak itu dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan hubungan komunal atau agregatif, ataupun untuk kepentingan individual pribadi-pribadi tertentu. Pada kasus terakhir, maka hak-hak tersebut dinikmati atas dasar kepentingan pribadi semata-mata, sehingga hak itu dapat diwariskan..

Seorang peserta aktif dalam hubungan sosial tertutup lazimnya dinamakan anggota; namun apabila partisipasinya diatur sedemikian rupa sehingga menjamin hak-haknya, maka dia disebut sebagai anggota secara hukum yang mempunyai hak dan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Beberapa contoh yang perlu dicatat adalah, sebagai berikut:

1. Hubungan komunal yang cenderung erat karena tradisi, adalah umpamanya, kelompok yang keanggotaannya didasarkan pada hubungan kekerabatan.
2. Hubungan-hubungan pribadi yang bersifat emosional, yakni yang didasarkan pada rasa cinta atau kesetiaan, biasanya bersifat tertutup.
3. Ketertutupan yang didasarkan pada nilai-nilai merupakan ciri kelompok yang didasarkan pada kepercayaan atau agama yang sama.
4. Ketertutupan orientasi tujuan merupakan ciri asosiasi ekonomi yang bersifat monopolistis atau plutokratis.

Intensitas maupun metode untuk memelihara jarak dengan fihak luar merupakan suatu gejala yang bersifat gradual. Adakalanya fihak luar harus menjalani pelbagai ujian agar dapat diterima sebagai anggota; sesudah itu ada suatu masa percobaan tertentu, dan seterusnya. Dengan demikian, maka regulasi dan ketertutupan merupakan konsep-konsep relatif. Di dalam kenyataan dapat dijumpai pelbagai tahap transisional; ada perkumpulan-perkumpulan eksklusif, teater yang hanya boleh dimasuki mereka yang telah membeli karcis, kelompok yang sedang berdemonstrasi yang mencari peserta sebanyak-banyaknya, dan seterusnya.

Selain dari itu akan dapat dijumpai pelbagai bentuk pembatasan, baik dalam hubungan antara sesama anggota maupun dengan fihak-fihak luar. Misalnya, hubungan antara warga-warga masyarakat berkasta yang mengenal pembatasan-pembatasan yang sangat ketat yang didasarkan pada kelahiran. Suatu masyarakat hukum tertentu yang mempunyai tanah, tidak akan mengizinkan fihak luar untuk menger-

jakan tanah itu (mungkin dengan pengecualian apabila syarat rekognisi dan retribusi dipenuhi).

Motivasi-motivasi pokok untuk mengadakan hubungan sosial terbatas, adalah :

1. usaha untuk mempertahankan kualitas maupun prestise dan kesempatan yang diperoleh untuk menikmati kehormatan atau keuntungan tertentu.
2. keterbatasan kesempatan dalam hubungan pemenuhan kebutuhan konsumtif.
3. keterbatasan kesempatan untuk hidup layak.

Ketiga motif tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya.

E. TANGGUNG JAWAB DALAM HUBUNGAN SOSIAL

Suatu hubungan sosial, halmana tergantung pada apakah proses itu dikuasai wewenang tradisional atau legal, mungkin menghasilkan tipe-tipe perilaku tertentu oleh mereka yang terlibat dalam hubungan itu, yang mempunyai akibat-akibatnya. Melihat kenyataan itu dapat dikatakan bahwa semua bertanggung jawab atas perilaku pribadi masing-masing anggota kelompok, halmana lazimnya disebut solidaritas kolektif. Kadangkala perilaku seorang anggota kelompok mengikat rekan-rekan sekelompok, oleh karena dia mewakili kelompok. Dalam keadaan demikian, maka tanggung jawab terletak pada wakil tersebut.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hubungan sosial mungkin menghasilkan solidaritas kolektif atau perwakilan. Khususnya mengenai perwakilan tersebut dapat dikatakan, bahwa hal itu merupakan suatu proses dalam mana wewenang tertentu atau kekuasaan tertentu diserahkan kepada fihak lain yang

dianggap mampu melaksanakannya, sehingga dapat dianggap sebagai wakil suatu kelompok tertentu.

Perkembangan hubungan sosial menjadi ikatan solidaritas atau perwakilan, tergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satu kondisi yang menentukan adalah sampai sejauh manakah perilaku kelompok diarahkan pada konflik dengan kekerasan atau kedamaian sebagai tujuan. Selanjutnya terdapat keadaan-keadaan khusus yang mungkin mempengaruhinya. Sudah tentu bahwa perkembangan tersebut tidak begitu tampak mencolok pada kelompok-kelompok yang mencapai tujuannya secara damai. Kadang-kadang gejala solidaritas dan perwakilan dapat dihubungkan dengan ketertutupan kelompok terhadap fihak luar, walaupun tidak selalu demikianhalnya.

Dalam kenyataan, masalah tanggung jawab mencakup baik solidaritas aktif maupun pasif. Semua fihak dapat dibebani tanggung jawab terhadap perilaku salah seorang anggota, sebagaimana halnya dengan dirinya sendiri, dan anggota-anggota lain mempunyai hak untuk ikut menikmati kemajuan-kemajuan yang dicapai karena perilaku pribadinya. Tanggung jawab itu mungkin mempunyai orientasi keagamaan atau kepercayaan. Kadang-kadang tanggung jawab tersebut dapat dikembalikan pada manusia, atas dasar konvensi, misalnya, dalam hal pembalasan dendam yang dilakukan dengan bantuan kerabat, atau hukuman yang dijatuhkan terhadap penjahat yang dilakukan penduduk suatu desa. Tanggung jawab tersebut mungkin didasarkan pada hukum, seperti misalnya, seorang anggota keluarga bertanggung jawab penuh atas hutang-hutang yang dibuatnya.

Kadang solidaritas berarti bahwa anggota-anggota suatu kelompok tertutup baik karena wewenang tra-

disional atau legal, mempunyai hak yang sama untuk menikmati hasil perilaku fihak yang mewakili dan hasil-hasil yang dicapainya. Secara khas solidaritas akan dapat dijumpai pada :

1. kelompok-kelompok komunal tradisional yang didasarkan pada kewarisan atau proses kehidupan yang sama, misalnya suatu rumah tangga atau klen.
2. hubungan-hubungan tertutup yang memonopoli kesempatan-kesempatan yang ada dan mengalokasikan keuntungan-keuntungan atas dasar kekuatan sendiri, seperti misalnya, organisasi politik.
3. organisasi-organisasi yang mengejar keuntungan yang dijalankan atas dasar kerja sama usaha dagang.
4. keadaan-keadaan tertentu, seperti misalnya, pada organisasi-organisasi tenaga kerja.

Perwakilan biasanya terjadi dalam asosiasi-asosiasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan dalam organisasi-organisasi yang terbentuk atas dasar hukum, khususnya apabila dikumpulkan dana yang harus dikelola demi kepentingan para anggota kelompok tersebut. Kekuasaan biasanya didelegasikan pada fihak lain atas dasar kemampuan tertentu, senioritas ataupun syarat-syarat lainnya.

BAHAN PUSTAKA ACUAN

Hagedorn, Robert (General editor). *Sociology*. Toronto: Holt, Rinehart and Winston of Canada, Limited, 1980.

Secher, H.P. *Basic Concepts in Sociology by Max Weber*. New York: The Citadel Press, 1962.

BAB IV
KONSEP WEWENANG

A. KONSEP WEWENANG YANG SAH.

Perilaku manusia, khususnya perilaku sosial teristimewa hubungan sosial, dari sudut para individu dapat berorientasi pada gagasan mengenai eksistensi suatu wewenang yang sah. Kemungkinan terjadinya orientasi itu secara aktual akan dinamakan validitas wewenang yang dipermasalahkan.

Validitas wewenang tidak hanya berarti suatu perilaku sosial teratur yang ditentukan oleh adat-istiadat atau kepentingan diri. Fakta bahwa seorang pengusaha mengiklankan hasil-hasil perusahaannya secara teratur, disebabkan keinginannya untuk memanfaatkan kesempatan demi kepentingan dirinya. Seorang penjaja makanan yang setiap minggu mendatangi langganannya merupakan hasil kebiasaan lama atau kepentingan diri. Kalau seorang pegawai negeri setiap hari masuk kantor, mungkin hal itu ditimbulkan karena adat-istiadat, kepentingan diri, dan ketaatannya pada aturan-aturan kantor yang sangat berpengaruh pada konduitenya.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa isi suatu hubungan sosial mencerminkan wewenang, apa-

bila perilaku tersebut dapat diorientasikan pada aksioma-aksioma tertentu yang dikenal. Baru dalam keadaan demikian suatu wewenang mendapatkan validitas kalau orientasi terhadap aksioma-aksioma itu mencakup paling sedikit suatu pengakuan bahwa hal itu mengikat pribadi atau bahwa perilaku itu pantas untuk ditiru. Memang benar bahwa orientasi tersebut dilandaskan pada aneka motif. Namun, fakta bahwa wewenang juga dilandaskan pada anggapan bahwa hal itu mengikat atau pantas untuk ditiru meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku-perilaku faktual akan menyesuaikan diri atau mentaatinya. Suatu wewenang yang ditaati semata-mata karena kebiasaan biasanya tidak begitu stabil apabila dibandingkan dengan wewenang yang pentaatannya didasarkan pada adat-istiadat murni. Sikap yang terakhir merupakan hal yang paling umum. Namun, kestabilan akan meningkat kalau wewenang tersebut mengikat oleh karena dipandang sah. Perkembangan gradual menandai proses transisi dari perilaku yang berorientasi pada tujuan atau tradisi menuju ke orientasi kepercayaan akan sahnya wewenang tersebut.

Dalam kenyataan mungkin terjadi bahwa yang menjadi pegangan adalah orientasi terhadap wewenang yang sah, walaupun artinya tidak dipatuhi. Kemungkinan juga ada dalam hal suatu wewenang dianggap sebagai norma yang sah, namun artinya malahan dilanggar, walaupun norma tersebut mempunyai pengaruh terhadap perilaku. Perilaku seorang pencuri, misalnya, membuktikan validitas hukum pidana oleh karena dia berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya. Fakta bahwa suatu wewenang dianggap sah dalam suatu kelompok menyebabkan pencuri tadi menyembunyikan praktek perilakunya. Menurut Max Weber, (H.P. Secher 1962 : 72)

"This is, of course, a marginal case and frequently the authority is violated partially only in one or another respect or its violation is sought to be passed off as legitimate with a varying measure of good faith".

Ada kemungkinan terdapatnya pelbagai penafsiran mengenai wewenang yang saling berdampingan. Sosiologi akan menganggap salah-satu sebagai penafsiran yang sah, sepanjang hal itu membentuk proses perilaku manusia. Adalah tidak terlampau sulit bagi seorang sosiolog untuk mengidentifikasikan adanya pelbagai sistem wewenang yang sah, yang mungkin saling bertentangan. Seorang individu mungkin juga berorientasi pada sistem-sistem wewenang yang saling bertentangan. Hal itu mungkin saja terwujud dalam perilaku yang sama. Seseorang yang terlibat dalam suatu duel, berorientasi pada kode kehormatan. Namun, dia juga berorientasi pada hukum pidana dengan cara merahasiakannya, atau dengan cara membiarkan dirinya diadili. Bagi seorang yuris suatu sistem wewenang adalah sah atau tidak sah; pilihan itu tak ada pada seorang sosiolog. Bagi seorang sosiolog terjadi suatu proses transisi gradual antara dua kutub yaitu validitas ekstrim dan non-validitas ekstrim, sehingga bagi seorang sosiolog kemungkinan adanya sistem-sistem wewenang yang saling bertentangan memang ada. Setiap sistem wewenang adalah sah dalam proporsinya terhadap kemungkinan bahwa perilaku tertentu secara aktual akan berorientasi pada wewenang itu.

Mereka yang menyenangi studi kepustakaan, mengetahui konsep wewenang yang dibahas oleh R. Staemmler, yang ternyata menyesatkan. Staemmler tidak berhasil membedakan arti normatif validitas dengan artian empirisnya, dan dia juga tidak menyadari

bahwa perilaku sosial tidak hanya berorientasi pada wewenang, akan tetapi juga pada hal-hal lainnya. Secara tidak logis Staemmler menganggap wewenang sebagai bentuk perilaku sosial dan mencoba menghubungkannya dengan isi dengan menerapkan analogi.

Staemmler beranggapan bahwa hubungan kausal antara wewenang dengan perilaku sosial empiris merupakan sesuatu yang mustahil secara konseptual. Memang benar bahwa antara validitas normatif ortodoks dan legal suatu sistem wewenang dengan setiap proses empiris tidak dapat ditemukan hubungan kausal. Dalam konteks itu hanya ada masalah apakah sistem wewenang sebagaimana ditafsirkan dengan benar secara yuridis berlaku pula bagi suatu situasi empiris. Masalahnya adalah apakah hal itu harus dianggap benar secara normatif, dan apabila demikian apakah yang seharusnya menjadi isi preskripsi-preskripsi normatif. Walaupun demikian, ada hubungan kausal antara perilaku sosial yang berorientasi pada kepercayaan subyektif terhadap validitas suatu wewenang, dengan perilaku sosial yang mempunyai orientasi ekonomis. Akan tetapi bagi tujuan-tujuan sosiologis, maka kemungkinan orientasi terhadap kepercayaan subyektif validitas wewenanglah yang merupakan wewenang yang sah itu.

B. TIPE—TIPE WEWENANG YANG SAH.

Sahnya suatu wewenang dapat dijamin dengan cara-cara, sebagai berikut:

1. berdasarkan hal yang murni subyektif, yakni:
   a. menyerah secara afektif atau emosional,
   b. berasal dari kepercayaan rasional terhadap validitas mutlak wewenang sebagai ekspresi

nilai-nilai yang mengikat secara etis, estetis, dan seterusnya

c. berasal dari sikap tindak keagamaan.

2. berdasarkan kepentingan diri, misalnya, harapan akan terjadinya akibat-akibat tertentu.

Suatu sistem wewenang bersifat konvensional, apabila validitasnya dijamin oleh kemungkinan bahwa penyimpangan terhadapnya akan ditentang baik secara umum maupun khusus. Suatu sistem wewenang dianggap sebagai hukum kalau secara eksternal terdapat jaminan terhadap kemungkinan bahwa perilaku menyimpang akan dijatuhi sanksi fisik atau psikis yang bertujuan untuk memaksa adanya ketaatan. Menurut Weber, (Julien Fruend 1969 : 124)

> "Convention means that uniformity of conduct is guaranteed by the probability that the individuals who depart from or violate it will meet with general disapproval within their group. Law means that the validity of an authority is guaranteed by the fact that there exists an organ set up for the express purpose of exerting coercion on the members of the group and that the violators may be punished".

Pada konvensi tidak dijumpai kalangan-kalangan tertentu yang bertugas menerapkannya. Ketaatan pada konvensi, seperti misalnya, berpakaian rapi, aturan pergaulan yang sopan santun, harus dianggap mengikat oleh para individu. Hal ini tidak sama dengan kemungkinan-kemungkinan untuk memilih cara masak yang bebas. Pelanggaran terhadap konvensi, misalnya etika profesi, seringkali dihadapi dengan retribusi yang efektif dan keras dalam bentuk ostrasisme sosial, yang mungkin lebih keras apabila dibandingkan dengan sanksi hukum (yang negatif). Hanya sebagai-

mana dikemukakan di atas, tidak ada organ-organ tertentu yang bertugas menegakan konvensi tersebut, seperti hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Namun, sebagaimana dinyatakan oleh Weber (H.P. Secher 1962 : 76)

> "... there is no clear dividing line to be found here The marginal case of a conventional guarantee of an authority in the process of transition to a legal guarantee of authority is to be found in the application of the formally threatened and organized boycott. But in our terminology this already constitutes a means of legal coercion. It is irrelevant in the present context that in certain instances a convetion may, in addition to mere disapproval, also be protected by other means, as for example in the case of the master of the house who expels the visitor whose conduct appears to him as unconventional. What is decisive in this case is that a single individual, by virtue of conventional disapproval applies these — often very drastic sanctions — not as a member of an organized group endowed with specific authority, but merely on the basis of his own authority".

Konsep hukum akan dirumuskan dalam kaitannya dengan adanya suatu organ penegakan tertentu. Ciri organ penegakan itu tidak perlu sama dengan apa yang biasa dilihat dewasa ini. Khususnya tidaklah perlu adanya suatu organ yudisial. Kalau terjadi balas dendam berdarah dalam suatu klen, misalnya, maka klen tersebut menjadi organ penegakan aturan-aturan yang berlaku. Namun, peristiwa itu merupakan kasus ekstrim yang dapat dianggap sebagai penegakan hukum secara paksa. Kiranya sudah diketahui, bahwa hukum internasional lazimnya dianggap tidak mem-

punyai kualitas hukum, oleh karena tak ada organ penegakan yang supra nasional. Rumusan hukum mencakup suatu sistem wewenang yang legitimasinya didasarkan pada harapan, bahwa suatu sanksi akan dijatuhkan kepada mereka yang melanggar hukum. Artinya, perilaku dijamin seluruhnya oleh konvensi dan kebiasaan, sehingga bukan adanya organ penegakan yang menentukan sebagai dasar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana penegakan tidak begitu penting. Suatu persuasi bersahabat sebagai tekanan yang sangat lunak berisikan suatu paksaan, apabila dilaksanakan atas dasar aturan yang berlaku oleh kelompok tertentu yang ditugaskan. Hal yang sama juga terjadi apabila dipergunakan sensor maupun tekanan psikis. Dengan demikian hukum dapat dijamin oleh wewenang keagamaan maupun politik, serta juga oleh perundang-undangan tertentu, atau bahkan oleh wewenang kepala rumah tangga. Secara sosiologis aturan-aturan suatu organisasi fraternal merupakan hukum; demikian pula halnya dengan aturan-aturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan (sebagai contoh Weber menyebut pasal 888 bagian 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman). "Leges imoerfectae" dan kategori kewajiban-kewajiban alamiah merupakan bentuk terminologi hukum yang secara tidak langsung mengekspresikan batas-batas atau kondisi-kondisi penggunaan paksaan. Hukum lalu lintas yang dipaksakan juga merupakan hukum.

Tidak setiap wewenang sah harus bersifat umum. Perbedaan antara konsep hukum dengan suatu keputusan yudisial tidak selalu jelas. Dengan demikian, maka wewenang mungkin timbul berdasarkan kekuasaan mengatur suatu situasi kongkrit tunggal. Hal ini merupakan obyek sosiologi hukum.

Suatu sistem wewenang yang dijamin oleh sanksi-sanksi eksternal mungkin membudaya. Hubungan antara hukum, konvensi dan etika tidak merupakan persoalan bagi seorang sosiolog. Seorang sosiolog menganggap suatu patokan sebagai hal yang etis, kalau itu dianggap sebagai nilai yang baik, sebagaimana halnya dengan sesuatu yang dianggap indah dari sudut estetis. Hal ini biasanya terjadi kalau pelanggaran terhadap patokan tersebut tidak mempengaruhi kepentingan fihak lain secara negatif.

Kadang-kadang patokan etis tersebut dari sudut agama dijamin dengan sanksi-sanksi. Namun patokan itu dapat pula dijamin dengan sarana konvensional seperti pemogokan, atau penegakan hukum perdata ataupun hukum pidana oleh polisi. Setiap sistem etika yang sah secara sosiologis didasarkan pada konvensi; artinya, kalau terjadi pelanggaran, maka timbul reaksi negatif dari masyarakat. Namun, tidak setiap norma konvensional atau hukum merupakan etika. Kadang-kadang norma hukum dimotivasikan oleh kebiasaan. Kapan suatu wewenang normatif yang telah diakui tergolong etika, konvensi atau hukum, hanya dapat ditentukan secara empiris, atas dasar apa yang dianggap etis oleh masyarakat atau bagian masyarakat yang sedang diteliti. Dalam hal ini tidak mungkin membuat suatu generalisasi yang menyeluruh sifatnya.

C. VALIDITAS WEWENANG YANG SAH.

Suatu sistem wewenang adalah sah, menurut pandangan-pandangan tertentu. Pandangan-pendangan tersebut biasanya mencakup pelbagai cara, misalnya:

1. melalui tradisi; apa yang dari dahulu ada senantiasa sah.

2. melalui keterikatan emosional; apa yang dianggap baik senantiasa harus dianut.
3. kepercayaan terhadap nilai-nilai yang mutlak; apa yang dianggap mutlak sah adalah sah.
4. dalam bentuk pernyataan positif yang legalitasnya diakui, sehingga tidak boleh dipermasalahkan lagi. Legalitas itu dianggap sah, karena:
   a. kesepakatan secara sukarela.
   b. karena dipaksakan.

Dasar sahnya suatu wewenang yang paling tua dan universal adalah yang didasarkan pada kekeramatan tradisi. Rasa takut terhadap sanksi-sanksi magis memperkuat disiplin diri untuk mengubah perilaku yang sudah merupakan adat-istiadat. Pada saat yang bersamaan wewenang yang ada berlangsung terus dan dianggap sah karena adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya.

Wewenang-wewenang yang dibentuk secara sadar biasanya berasal dari kewibawaan dewa-dewa ataupun nabi-nabi. Ketaatan didasarkan pada kepercayaan terhadap sahnya kedudukan dan peranan dewa-dewa atau nabi-nabi. Dalam keadaan yang dikuasai tradisionalisme yang kuat, maka sulit membentuk sistem wewenang baru, kecuali dengan cara mengubah sistem kepercayaan yang ada.

Sahnya sesuatu yang didasarkan pada nilai-nilai berasal dari gagasan-gagasan mengenai hukum alam. Pengaruh kedudukannya yang berkembang secara logis terhadap perilaku aktual tidak selalu sesuai dengan idealismenya, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa pengaruhnya sangat besar. Dengan demikian, maka perlu diadakan pembedaan antara idealisme tersebut dengan hukum tradisional, hukum kepercayaan dan hukum yang sengaja ditetapkan.

Dewasa ini bentuk legitimasi yang lazim adalah kepercayaan terhadap legalitas, yakni ketaatan pada keputusan-keputusan yang secara formal benar dan yang diterapkan melalui tata cara yang dikenal. Pertentangan antara aturan-aturan yang disetujui secara sukarela dengan aturan-aturan yang dipaksakan bersifat relatif. Pada masa lampau, pengesahan suatu wewenang seringkali memerlukan kesepakatan umum. Dewasa ini, pengakuan dari mayoritas sudah cukup. Dalam keadaan demikian, maka wewenang biasanya dipaksakan oleh mayoritas terhadap minoritas. Kadang-kadang suatu minoritas yang memaksakan wewenangnya secara keras terhadap mayoritas yang mula-mula menentangnya. Menurut Weber, maka (H.P. Secher 1962 : 83)

> "Where voting is the legal method of creating or changing a system of authority, it happens frequently that the will of the minority achieves a formal majority to which the real majority acquiesces: in this case "majority rule" becomes mere sham. The belief in a contractual system of authority can be traced to fairly ancient times and can also be found among so-called primitive peoples, but in such cases it is almost always supplemented by the authority of oracle".

Ketaatan kepada wewenang yang dipaksakan oleh seseorang atau beberapa orang, senantiasa didasarkan pada kepercayaan terhadap wewenang sah yang merupakan sumber untuk memaksanya. Hal itu mungkin terjadi, apabila tidak didasarkan pada rasa takut semata-mata atau kebiasaan.

Biasanya ketaatan terhadap wewenang tertentu ditentukan oleh kombinasi beberapa motif, seperti kepentingan diri, keterikatan pada tradisi, keperca-

yaan pada legalitas, dan seterusnya. Seringkali mereka yang mematuhi suatu wewenang tidak menyadari sebab-sebabnya; hal itu menjadi tugas sosiolog.

D. TIPE—TIPE WEWENANG PADA KELOMPOK KORPORATIF.

Suatu perangkat aturan yang mengatur hubungan agregatif mungkin didasarkan pada kesepakatan sukarela atau karena paksaan. Wewenang yang berkuasa dalam kelompok korporatif mungkin menganggap dirinya mempunyai kekuasaan sah untuk menerapkan aturan-aturan baru. Adanya konstitusi berarti adanya kemungkinan praktikal bahwa aturan-aturan itu dipaksakan oleh wewenang yang berkuasa dengan maksud agar ditaati. Taraf, jenis faktor-faktor maupun kondisi yang menyebabkan timbulnya kemungkinan tersebut beraneka ragam sifatnya. Hal itu tergantung pada sistem wewenang yang ada apakah kondisi-kondisi tertentu memungkinkan terjadinya penetapan bahwa anggota-anggota kelompok-kelompok tertentu harus mewujudkan persetujuannya dengan cara yang sama. Aturan-aturan atau perundang-undangan suatu kelompok korporatif tidak hanya dapat dipaksakan keberlakuannya terhadap anggota-anggota nya, namun juga terhadap orang-orang lain kalau syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. Syarat-syarat itu biasanya dikaitkan dengan wilayah dan mengacu pada tempat tinggal, kelahiran, atau melakukan aksi-aksi tertentu di wilayah tersebut. Dalam kasus ini sistem wewenang dianggap mempunyai validitas teritorial. Kelompok korporatif yang aturan-aturannya diakui sahnya atas dasar prinsip teritorial, disebut kelompok korporatif teritorial.

Apabila dipergunakan secara sosiologis, maka setiap pengartian wewenang selalu bersifat memak-

sa, sepanjang hal itu tidak berasal dari suatu kesepakatan pribadi yang didasarkan pada kesukarelaan. Namun perlu diakui bahwa persetujuan-persetujuan yang secara formal bebas, kadang-kadang merupakan hasil paksaan. Dalam hal itu, maka seorang sosiolog hanya menelaah fakta aktualnya.

Konsep konstitusi yang dipergunakan di sini juga dipergunakan oleh Lassalle. Hal itu hendaknya tidak dirancukan dengan konstitusi tertulis, atau dengan konstitusi dalam artian hukumnya. Yang penting bagi seorang sosiolog adalah, bilamana, untuk tujuan apa, dalam batas-batas apa, atau dalam kondisi-kondisi khusus bagaimana anggota-anggota kelompok korporatif tunduk pada wewenang penguasa. Selanjutnya yang perlu menjadi perhatian sosiolog adalah dalam kondisi-kondisi bagaimanakah penguasa dapat menerapkan aturan-aturan baru.

Contoh-contoh penerapan wewenang atas dasar validitas teritorial adalah misalnya (H.P. Secher 1962: 112)

> "... the precepts of criminal law and various other legal rulings which require that as criteria for their applicability the person was resident, born, and performed or completed the action within the area controlled by the corporate goup".

E. HAKIKAT WEWENANG ADMINISTRATIF DAN REGULATIF DALAM KELOMPOK–KELOMPOK KORPORATIF.

Sistem wewenang yang mengatur perilaku korporatif disebut wewenang administratif. Suatu sistem wewenang yang menguasai perilaku sosial lainnya, sehingga melindungi kepentingan-kepentingan maupun pribadi-pribadi dalam sistem, disebut wewenang

regulatif. Kalau suatu kelompok korporatif terlibat dalam wewenang administratif, maka kelompok itu disebut kelompok administratif, sedangkan kelompok regulatif berorientasi pada wewenang regulatif.

Dalam kenyataannya kelompok-kelompok korporatif mempunyai kedua ciri tersebut di atas. Hanya pemerintahan negara yang secara ideal dilandaskan pada supremasi hukum merupakan kelompok korporatif regulatif yang murni. Pada sistem demikian, pengendalian terhadap sistem moneter sepenuhnya diserahkan pada fihak swasta.

Konsep wewenang administratif mencakup semua aturan yang mengatur perilaku staf administrasi maupun anggota-anggota kelompok. Tipe hubungan anggota-kelompok semacam itu mencakup perilaku yang mengabdi pada tujuan yang wajib dicapai, halmana sudah direncanakan terlebih dahulu, sehingga tinggal dilaksanakan oleh staf administrasi dan anggota-anggotanya. Dalam suatu sistem ekonomi komunis yang sempurna hal itu mencakup semua bentuk perilaku sosial. Di lain fihak maka pada negara-negara liberal hal itu hanya mencakup fungsi-fungsi hakim, polisi, juri, tentara, legislator dan warga negara. Pembedaan antara wewenang administratif dengan wewenang regulatif adalah sama dengan pembedaan antara hukum publik dengan hukum privat dalam suatu kelompok korporatif politik.

F. KONSEP—KONSEP KEKUASAAN DAN DOMINASI.

Kekuasaan berarti kesempatan yang ada dalam suatu hubungan sosial yang memungkinkan suatu fihak menjalankan kemauannya walaupun mendapat perlawanan dari fihak lain, tanpa mempersoalkan dasar kesempatan itu. Dominasi merupakan suatu ke-

sempatan untuk memerintah, sehingga ditaati oleh suatu kelompok. Disiplin adalah suatu kesempatan untuk mendapatkan kepatuhan yang serta merta halmana dapat diduga berdasarkan orientasi terhadap perintah yang selama itu ada.

Secara sosiologis konsep kekuasaan tidak mempunyai bentuk tertentu. Setiap kualitas atau keadaan mungkin menempatkan suatu fihak pada posisi tersebut, sehingga dapat menuntut ketaatan dari fihak lainnya. Konsep dominasi sifatnya lebih terjabarkan dengan kemungkinan bahwa perintah ditaati. Konsep disiplin mencakup hakikat alamiah kepatuhan massa yang tidak kritis sifatnya.

Dominasi tergantung pada kehadiran aktual pemberi perintah, yang tidak memerlukan suatu staf administrasi suatu kelompok korporatif. Sepanjang anggota-anggota suatu kelompok korporatif tunduk pada penerapan dominasi yang legal. maka hal itu disebut dominasi korporatif.

Kalau suatu kelompok korporatif mempunyai staf administrasi, maka kelompok itu sampai batas-batas tertentu terlibat dalam proses dominasi. Namun, konsep tersebut relatif sifatnya. Secara normal dominasi korporatif pada saat yang bersamaan juga merupakan suatu organisasi administratif. Hakikat suatu kelompok korporatif ditentukan oleh pelbagai faktor. Faktor-faktor itu adalah, antara lain:

1. Cara pelaksanaan administrasi,
2. Ciri-ciri petugas-petugasnya.
3. Ruang lingkup pengendaliannya,
4. Ruang lingkup yurisdiksi efektif dominasi.

Faktor pertama dan kedua tergantung pada taraf tertinggi pengesahan wewenang.

Freund, Julien. *The Sociology of Max Weber.* (Penerjemah Mary Ilford). New York: Vintage Books, 1969.

Rheinstein, Max (Ed). *Max Weber on Law in Economy and Society.* (Penerjemah Edward Shils dan Max Rheinstein). New York: A Clarion Book, 1967.

Secher, H.P. *Basic Concepts in Sociology by Max Weber.* New York: The Citadel Press, 1962.

BAB V
KONSEP DAN TIPE KELOMPOK KORPORATIF

A. KONSEP DAN TIPE.

Pengartian kelompok korporatif menunjuk pada hubungan sosial tertentu yang tertutup bagi fihak luar atau membatasi masuknya orang luar dengan peraturan yang ketat. Wewenang diterapkan oleh fihak-fihak yang mempunyai fungsi itu, misalnya, seorang kepala yang biasanya dibantu staf administrasi. Fungsionaris-fungsionaris itu lazimnya secara normal melaksanakan kekuasaan yang tidak terbatas. Jabatan atau kedudukan staf administrasi berisikan wewenang pemerintahan yang dapat di delegasikan atas dasar tata cara tertentu yang ada. Pendelegasian wewenang mungkin bersifat tetap, sementara, atau hanya dalam keadaan-keadaan darurat. Perilaku korporatif adalah tindakan-tindakan staf administrasi atas dasar wewenangnya, atau pemilikan kekuasaan yang berorientasi pada pelaksanaan wewenang. Perilaku tadi juga mencakup sikap tindak anggota-anggota yang diarahkan oleh staf administrasi.

Bagi tujuan konseptualisasi tidak ada perbedaan antara hubungan komunal dengan hubungan agregatif. Adanya seseorang atau beberapa orang dalam po-

sisi-posisi wewenang yang diakui sudah cukup. Contohnya adalah kepala keluarga, dewan direktur, direktur pengelolaan, raja, presiden, kepala dewan gereja, dan lain sebagainya, yang perilakunya terarah pada penerapan hukum maupun aturan yang mengatur kelompok korporatif tersebut. Kriterium tersebut sangat menentukan oleh karena masalahnya tidak hanya terbatas pada perilaku yang berorientasi pada suatu wewenang, akan tetapi juga yang ditugaskan untuk menegakkannya. Tambahan unsur itu memperluas konsep hubungan tertutup secara sosiologis yang sangat penting dalam praktek. Suatu kelompok komunal atau agregatif tertutup tidak dengan sendirinya merupakan kelompok korporatif. Namun hal itu tidak benar, umpamanya, pada hubungan erotis atau pada kelompok kekerabatan yang tidak mempunyai sistem wewenang formal.

Apakah suatu kelompok korporatif ada atau tidak sepenuhnya merupakan masalah adanya fihak yang mempunyai wewenang, mungkin dengan suatu staf administrasi. Secara lebih tepat suatu kelompok korporatif ada sepanjang ada kemungkinan bahwa ada petugas-petugas yang bertingkah-laku sedemikian rupa sehingga mengekspresikan arti sesungguhnya aturan-aturan yang mengendalikan kelompok itu. Dengan perkataan lain ada orang-orang yang ditugaskan untuk bertindak dalam situasi tertentu. Secara konseptual tidak ada konsekuensinya apa yang menjadi penyebab orientasi semacam itu. Secara terminologis dan dalam ruang lingkup sosiologi, suatu kelompok korporatif tidak ada tanpa adanya kemungkinan bahwa proses perilaku yang berorientasi pada tata cara demikian. Kalau tidak terdapat kemungkinan adanya tipe perilaku demikian, maka yang ada hanyalah suatu hubungan sosial dan bukan suatu ke-

lompok korporatif. Apabila ada kemungkinan terjadinya perilaku demikian, kelompok korporatif sebagai gejala sosiologis akan hidup terus, walaupun petugas-petugasnya berganti. Sebagai tambahan pada perilaku staf administrasi atau perilaku yang diarahkan olehnya, mungkin ditemukan kasus-kasus lain yang menyangkut perilaku anggota-anggota yang bertujuan menjamin ketaatan pada wewenang.

Sistem wewenang sah yang ada mungkin juga mencakup kaidah-kaidah yang menjadi patokan perilaku. Orientasi terhadap kaidah-kaidah itu mungkin harus dilaksanakan secara berbeda dengan perilaku yang menyangkut masalah-masalah kelompok sebagai suatu unit. Perilaku yang berorientasi pada masalah-masalah kelompok korporatif adalah sikap tindak yang tertuju pada ketaatan kepada wewenang. Norma-norma yang menjadi bagian sistem wewenang yang sah merupakan perilaku yang tunduk pada aturan-aturan korporatif. Hanya perilaku staf administrasi dan perilaku yang diarahkan olehnya yang disebut perilaku korporatif. Contoh perilaku itu adalah, umpamanya, menjadi perajurit pada waktu negara berperang, tindakan-tindakan administratif, perilaku yudisial, dan seterusnya.

Suatu kelompok korporatif mungkin bersifat otonomis atau heteronomis, yang mungkin otosefalis atau heterosefalis. Otonomi berarti bahwa wewenang yang mengendalikan kelompok dibentuk oleh para anggota melalui kegiatan-kegiatannya, halmana merupakan lawan heteronomis yang mendapatkan wewenang dari sumber luar dengan paksa. Otosefali berarti bahwa pimpinan bertindak atas dasar wewenang otonomis kelompok korporatif itu sendiri, sedangkan pada heterosefali wewenangnya tunduk pada sumber-sumber wewenang luar.

Unsur-unsur itu mungkin hanya sebagian yang ada dalam suatu situasi tertentu. Suatu kelompok korporatif yang sekaligus mempunyai unsur heteronomis dan heterosefalis adalah, misalnya, suatu resimen angkatan darat, sebagai bagian dari kelompok ekstensif. Apakah hal itu benar atau tidak, lazimnya tergantung pada kebebasan aktual orientasi perilaku dalam suatu keadaan atau kasus tertentu.

B. HAKIKAT ORGANISASI

Suatu organisasi merupakan suatu sistem aktivitas sinambung yang mengejar tujuan-tujuan tertentu. Organisasi korporatif merupakan suatu hubungan sosial agregatif yang mempunyai staf administrasi yang kegiatannya berorientasi hanya pada pencapaian tujuan organisasi secara terus-menerus.

Asosiasi sukarela (klab) merupakan kelompok korporatif yang didasarkan pada persetujuan secara sukarela yang aturan-aturannya hanya sah bagi anggota-anggota yang secara pribadi menjadi bagian kelompok itu. Asosiasi memaksa (lembaga; institusi) adalah suatu kelompok korporatif yang aturan-aturannya dipaksakan dengan berhasil dalam suatu ruanglingkup yurisdiksi, terhadap setiap perilaku pribadi yang taat pada kriteria tertentu yang khas. Selama kriterium kesinambungan diperlakukan, maka masalah-masalah administrasi politik maupun keagamaan dan bisnis tercakup dalam konsep organisasi.

Asosiasi sukarela dan merupakan kelompok-kelompok korporatif yang didasarkan pada suatu sistem wewenang rasional. Dengan lain perkataan, kalau suatu kelompok mempunyai sistem wewenang yang terbentuk secara rasional, maka kelompok itu dikenal sebagai asosiasi sukarela atau dipaksa. Negara merupakan suatu contoh asosiasi yang dipaksa, ber-

sama dengan kelompok-kelompok heterosefalis yang menjadi bagiannya. Gereja juga merupakan suatu contoh, selama sistem wewenangnya dibentuk secara rasional. Wewenang yang mengendalikan asosiasi yang dipaksa adalah sah bagi fihak-fihak yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kriteria tersebut adalah, umpamanya kelahiran, tempat tinggal, atau penggunaan fasilitas-fasilitas tertentu. Adalah tidak penting apakah seseorang secara pribadi hanya mengasumsikan adanya suatu kewajiban (sebagaimana halnya pada asosiasi sukarela), atau apakah dia berpartisipasi dalam pembentukan wewenang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa wewenang-wewenang tersebut dalam artian sesungguhnya dipaksa. Khususnya suatu asosiasi yang dipaksa mungkin merupakan suatu kelompok korporatif yang batas kekuasaannya ditentukan secara teritorial.

Kontras antara asosiasi memaksa dengan yang sukarela bersifat relatif. Aturan-aturan suatu asosiasi sukarela mungkin mempengaruhi kepentingan-kepentingan bukan anggota dan dapat dipaksakan agar validitasnya diakui, baik melalui kekuatan ataupun menurut hukum. Kiranya perlu dicatat, bahwa secara konseptual pengartian-pengartian asosiasi sukarela dan memaksa tidak dimaksudkan untuk mencakup semua tipe kelompok korporatif. Pengartian-pengartian itu hanya merupakan polarisasi belaka.

C. TIPE—TIPE KELOMPOK KORPORATIF POLITIK DAN KEAGAMAAN.

Dominasi korporatif disebut politis sepanjang eksistensinya dan validitas hukumnya membatasi wilayah teritorial dan dijamin oleh suatu staf administrasi melalui aplikasi sinambung dan ancaman kekuatan. Suatu asosiasi politik memaksa dengan organi-

sasi sinambung disebut negara, selama staf administrasinya mempunyai monopoli penggunaan kekuatan fisik secara legal dalam menegakkan wewenangnya. Perilaku sosial, terutama kelompok korporatif, akan berorientasi secara politis, sepanjang tujuannya adalah mempengaruhi kepemimpinan suatu kelompok korporatif politik terhadap segala segi kekuasaan.

Dominasi korporatif disebut hierokratis kalau melaksanakan paksaan psikis untuk mempertahankan wewenangnya, dengan cara memberikan atau menahan hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Suatu asosisi hierokratis memaksa disebut gereja, sepanjang staf administrasinya mempunyai monopoli penggunaan paksaan hierokratis secara sah.

Penggunaan kekuatan fisik bukanlah satu-satunya cara atau metode normal yang digunakan administrasi kelompok-kelompok korporatif politis. Hal itu sebenarnya berarti, bahwa pemimpin-pemimpinnya pernah menggunakan cara-cara lain untuk mencapai tujuan. Ancaman dengan mempergunakan kekuatan biasanya merupakan upaya terakhir. Namun, tidak hanya kelompok-kelompok korporatif politis saja yang mempergunakan kekuatan fisik; juga kelompok-kelompok lain juga mempergunakannya, terutama yang bersenjata. Kelompok korporatif politis dibedakan atas dasar fakta bahwa wewenang staf administrasi mengikat dalam suatu wilayah teritorial tertentu yang didukung dengan suatu kekuatan tertentu. Kalau suatu kelompok korporatif yang menggunakan kekuatan juga mempunyai yurisdiksi teritorial, maka kelompok tersebut merupakan suatu kelompok politik.

Adalah tidak mungkin untuk merumuskan suatu kelompok politik dari sudut tujuan-tujuannya yang

ingin dicapai dengan perilaku korporatif. Menurut Weber (H.P. Secher 1962 : 120).

> "From the concern for bodily welfare to the patronage of art, there is no conceivable goal which some political corporation has not at some time pursued, nor is there a goal, from the protection of personal security to the administration of justice, which all have recognized".

Akibatnya adalah bahwa ciri politik suatu kelompok korporatif hanya dapat ditentukan atas dasar sarana yang sama sekali tidak khas, yang mungkin menjadi tujuannya, akan tetapi yang harus ada, dan itu adalah penggunaan kekuatan. Pembedaan dapat dilakukan secara lebih cermat terhadap aspek-aspek politik, yang dipermasalahkan. Di dalam kenyataan apa pejabat politik, surat kabar politik, partai politik, klab politik, revolusi politik maupun konsekuensi politik perilaku, dan seterusnya. Hal itu dapat dibedakan dari aspek-aspek ekonomis, kebudayaan atau keagamaan seseorang atau masalah-masalah tertentu. Penggunaan istilah politik dalam konteks ini berarti hal-hal yang berkaitan dengan wewenang dalam suatu organisasi politik, yakni negara. Hal itu mengacu pada proses mempertahankan, mengembangkan, maupun menggulingkan kepentingan-kepentingan negara, yang berbeda dengan orang-orang, benda-benda maupun peristiwa-peristiwa yang tidak berhubungan dengannya. Kebiasaan ini membawa akibat mengusahakan identifikasi terhadap ciri-ciri umum pelbagai sarana penerapan dominasi yang biasa dilakukan oleh negara.

Walaupun demikian adalah benar untuk mengatakan bahwa definisi yang dipergunakan di sini hanya merupakan formulasi yang lebih cermat oleh karena memberikan tekanan pada ciri-ciri pokok dari sarana

ancaman penggunaan kekuatan secara aktual. Dalam pembicaraan sehari-hari hal-hal yang bersifat politis tidak hanya dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang mempergunakan kekuatan secara sah, namun juga bagi kelompok-kelompok damai yang bertujuan mempengaruhi perilaku korporatif politis. Oleh karena itu ada baiknya untuk membedakan *Perilaku Sosial Berorientasi Politis Dengan Perilaku Korporatif Kelompok-kelompok Politik.*

Konsep negara sebaiknya dirumuskan serasi dengan negara modern, oleh karena terjadinya proses perkembangan yang relatif pesat menuju lebih mantapnya bentuk negara. Selain itu, maka hal itu senantiasa harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku dewasa ini, terutama yang mengalami perubahan-perubahan. Ciri-ciri formal primer negara modern adalah, bahwa negara merupakan suatu wewenang administratif dan yudisial yang mungkin diubah dengan perundang-undangan. Wewenang tersebut berorientasi pada aktivitas korporatif staf administrasi yang terorganisasi yang mungkin juga dapat diubah oleh perundang-undangan. Sistem wewenang tersebut diakui sah tidak hanya oleh warga negara, namun juga sah dalam lingkungan wilayah tertentu yang menjadi daerah yurisdiksinya. Dengan demikian negara merupakan asosiasi memaksa dengan basis teritorial tertentu. Penggunaan kekuatan dianggap sah sepanjang diizinkan atau diperintahkan oleh negara. Ciri monopoli penggunaan kekerasan oleh negara adalah sepenting ciri-ciri lainnya, yakni aspek yurisdiksi memaksa dan organisasi yang sinambung.

BAHAN PUSTAKA ACUAN

Secher, H.P. *Basic Concepts in Sociology by Max Weber.* New York: The Citadel Press, 1962.

BAB VI
PENUTUP

Hal-hal yang telah disajikan secara garis besar dalam bab-bab di muka hanya merupakan sebagian hasil karya Weber dalam bidang sosiologi, terutama aspek konsepsionalnya. Namun dari penyajian sebagian hasil karyanya tampak, bahwa jalan fikiran Weber ditandai dengan suatu wawasan yang luas yang bersifat metodologis, ilmiah dan filosofis. Di samping itu Weber juga memperhatikan antagonisme yang ada yang tidak memungkinkan pengelompokan pengartian-pengartian dalam suatu sistem yang tunggal.

Hasil karya Weber tampak tersebar di mana-mana. Namun dibalik itu terdapat suatu dorongan keras untuk senantiasa merumuskan konsep-konsep yang dipergunakannya dan dia berusaha untuk membahas pelbagai masalah secara proporsional. Dari metodologinya saja akan tampak bahwa Weber menelaah kekeliruan-kekeliruan penggunaan logika, kesamaran-kesamaran, maupun ketidakcermatan.

Jalan fikiran Weber kadang-kadang tampak tidak begitu sistematis. Hal itu disebabkan, oleh karena menurut dia pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian merupakan proses yang tidak ada akhirnya. Dengan menyajikan suatu sistem yang tidak mutlak sifatnya, dimungkinkan untuk senantiasa mengadakan

perubahan-perubahan yang diperlukan untuk melengkapi sistem tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan yang disajikan dalam bab-bab dimuka, nyata bahwa pemikiran ilmiah Weber agak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan politiknya. Sebab, menurut Weber, keanekaragaman dan antagonisme nilai-nilai adalah paralel dengan keanekaragaman dan antonisme gejala-gejala yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Di samping itu Weber menghindarkan diri dari penjelasan yang bertitik tolak pada suatu titik tolak berfikir tunggal. Dia selalu beranjak dari asumsi dasar bahwa realitas empiris sangat luas ruang lingkupnya. Hal itu berarti bahwa manusia dengan fikirannya tidak mungkin mencakup segala peristiwa yang terjadi secara empiris dan bahwa tidak semua unsur-unsur yang kecil-kecil akan dapat dicakup oleh kemampuan telaah seorang ilmuwan.

Selanjutnya Weber menyatakan bahwa penggunaan suatu metode tertentu berarti mengatur aspek-aspek tertentu dari hubungan-hubungan yang terjadi dalam kenyataan. Adalah tidak mungkin untuk mengatur semua unsur-unsur hubungan-hubungan itu secara metodologis. Dalam mengadakan pengaturan tersebut dapat dipergunakan metode abstraksi yang bertujuan untuk merumuskan hukum-hukum umum dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan kualitatif sehingga menjadi unsur yang dapat diukur secara kuantitatif. Metode lainnya yang dapat diterapkan adalah metode individualisasi yang memberikan tekanan pada aspek-aspek kualitatif suatu gejala yang berbeda satu dengan lainnya. Namun perlu dicatat bahwa konsep tetap diperlukan dalam penggunaan metode apa pun, walaupun konsep tersebut tidak mungkin mereproduksikan kenyataan secara sempurna.